



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 69/Permentan/SR.130/11/2012

TENTANG  
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan agar dalam pelaksanaan subsidi pupuk dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I;
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662);

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sector Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

Memerhatikan : Kesimpulan Rapat Kerja Komisi-IV DPR RI dengan Menteri Pertanian dalam rangka pembahasan Usulan Subsidi Pupuk Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, tanggal 9 Oktober 2012;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

4. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
6. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
7. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
8. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
13. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
14. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk An-organik dan pupuk Organik di dalam negeri.
15. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
16. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
17. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.
20. Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
21. Dinas adalah Instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

## BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

## BAB III KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut provinsi, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada pertengahan bulan Desember 2012.

#### Pasal 5

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Desember 2012.

#### Pasal 6

Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (5) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

### BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 8

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

## Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
  - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
  - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten/Kota.

## Pasal 10

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyalur di Lini III dan Penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

## Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Pupuk Urea = Rp.1.800; per kg;
- Pupuk SP-36 = Rp.2.000; per kg;
- Pupuk ZA = Rp.1.400; per kg;
- Pupuk NPK = Rp.2.300; per kg;
- Pupuk Organik = Rp. 500; per kg;

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea = 50 kg;
- Pupuk SP-36 = 50 kg;
- Pupuk ZA = 50 kg;
- Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
- Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

#### Pasal 12

Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

### Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan

#### BAB V

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

#### Pasal 14

(1) KPPP provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.

(2) KPPP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.



#### Pasal 15

- (1) KPPP kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) KPPP provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2012

MENTERI PERTANIAN,

Ttd.  
SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
10. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Lampiran 1. Peraturan Menteri Pertanian  
Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2013  
MENURUT SUB SEKTOR**

<b>SUB SEKTOR</b>	<b>JENIS PUPUK (Ton)</b>				
	<b>UREA</b>	<b>SP-36</b>	<b>ZA</b>	<b>NPK</b>	<b>ORGANIK</b>
Tanaman Pangan	2,976,700	582,277	641,486	1,628,294	687,513
Hortikultura	234,891	46,850	49,050	240,859	60,959
Perkebunan	625,092	152,743	280,010	460,712	109,934
Peternakan	123,147	23,420	24,883	44,402	19,500
Perikanan Budidaya	140,170	44,711	4,571	25,732	22,094
<b>JUMLAH</b>	<b>4,100,000</b>	<b>850,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>900,000</b>

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Nopember 2012  
MENTERI PERTANIAN,**

Ttd.

**SUSWONO**

Lampiran 2. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2013  
 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI**

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	N A D	70,000	23,000	12,000	44,000	12,240
2	SUMATERA UTARA	160,000	55,000	57,000	125,000	27,900
3	SUMATERA BARAT	76,000	34,000	16,000	52,000	16,380
4	J A M B I	31,000	20,400	6,700	42,000	16,650
5	R I A U	32,000	10,200	7,800	42,000	9,000
6	BENGGULU	26,000	6,800	4,400	32,000	9,000
7	SUMATERA SELATAN	150,000	40,000	10,000	175,000	27,000
8	BANGKA BELITUNG	18,000	3,400	2,000	20,000	5,400
9	LAMPUNG	248,000	45,000	23,300	152,000	36,000
10	KEP. RIAU	500	50	50	500	450
11	DKI. JAKARTA	500	50	50	500	450
12	BANTEN	60,000	20,400	1,500	26,000	9,900
13	JAWA BARAT	720,000	147,000	72,000	350,000	90,000
14	D.I. YOGYAKARTA	42,000	3,400	10,000	32,000	16,200
15	JAWA TENGAH	794,000	158,000	200,000	400,000	180,000
16	JAWA TIMUR	1,000,000	160,000	464,000	580,000	337,500
17	B A L I	43,000	2,200	6,500	27,000	19,440
18	KALIMANTAN BARAT	31,000	14,000	3,500	23,000	20,700
19	KALIMANTAN TENGAH	15,000	6,800	1,500	25,000	1,980
20	KALIMANTAN SELATAN	39,000	9,000	2,200	24,000	1,170
21	KALIMANTAN TIMUR	16,000	6,000	2,700	21,000	4,050
22	SULAWESI UTARA	20,000	4,500	700	12,000	2,160
23	GORONTALO	15,000	1,000	700	13,000	1,440
24	SULAWESI TENGAH	29,000	3,400	10,720	22,000	3,150
25	SULAWESI TENGGARA	19,000	6,800	4,200	15,000	5,850
26	SULAWESI SELATAN	262,500	40,000	60,000	80,000	21,150
27	SULAWESI BARAT	23,000	2,000	150	13,000	1,800
28	NUSA TENGGARA BARAT	126,000	20,000	7,500	30,000	11,700
29	NUSA TENGGARA TIMUR	24,000	4,500	10,000	11,000	4,500
30	MALUKU	2,000	100	1,900	1,800	360
31	PAPUA	5,000	2,300	120	6,000	5,490
32	MALUKU UTARA	1,100	300	600	1,700	720
33	PAPUA BARAT	1,400	400	210	1,500	270
	<b>JUMLAH</b>	<b>4,100,000</b>	<b>850,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>900,000</b>

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 30 Nopember 2012

**MENTERI PERTANIAN,**

Ttd.

**SUSWONO**

Lampiran 3. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2013 MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN**

(Ton)

JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
UREA	4,100,000	392,490	309,857	366,393	383,832	390,785	263,078	256,864	209,179	273,993	313,382	438,735	501,411
SP-36	850,000	72,611	79,698	79,401	82,625	72,579	65,838	56,169	50,761	56,493	71,294	85,903	76,628
ZA	1,000,000	91,000	84,000	83,000	93,000	84,000	78,000	77,000	75,000	78,000	80,000	88,000	89,000
NPK	2,400,000	218,400	201,600	199,200	223,200	201,600	187,200	184,800	180,000	187,200	192,000	211,200	213,600
ORGANIK	900,000	81,900	75,600	74,700	83,700	75,600	70,200	69,300	67,500	70,200	72,000	79,200	80,100
<b>JUMLAH PUPUK</b>	<b>9,250,000</b>	<b>856,401</b>	<b>750,756</b>	<b>802,694</b>	<b>866,358</b>	<b>824,564</b>	<b>664,316</b>	<b>644,133</b>	<b>582,440</b>	<b>665,886</b>	<b>728,676</b>	<b>903,038</b>	<b>960,739</b>

**Jenis Pupuk : UREA**

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	2,976,700	284,957	224,964	266,010	278,672	283,719	191,001	186,490	151,869	198,925	227,523	318,532	364,037
Hortikultura	234,891	22,486	17,752	20,991	21,990	22,388	15,072	14,716	11,984	15,697	17,954	25,135	28,726
Perkebunan	625,092	59,840	47,241	55,861	58,520	59,580	40,109	39,162	31,892	41,773	47,779	66,890	76,446
Peternakan	123,147	11,789	9,307	11,005	11,529	11,738	7,902	7,715	6,283	8,230	9,413	13,178	15,060
Perikanan Budidaya	140,170	13,418	10,593	12,526	13,122	13,360	8,994	8,782	7,151	9,367	10,714	14,999	17,142
<b>JUMLAH</b>	<b>4,100,000</b>	<b>392,490</b>	<b>309,857</b>	<b>366,393</b>	<b>383,832</b>	<b>390,785</b>	<b>263,078</b>	<b>256,864</b>	<b>209,179</b>	<b>273,993</b>	<b>313,382</b>	<b>438,735</b>	<b>501,411</b>

**Jenis Pupuk : SP-36**

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	582,277	49,741	54,596	54,392	56,601	49,719	45,101	38,478	34,773	38,700	48,838	58,846	52,492
Hortikultura	46,850	4,002	4,393	4,376	4,554	4,000	3,629	3,096	2,798	3,114	3,930	4,735	4,223
Perkebunan	152,743	13,048	14,322	14,268	14,848	13,042	11,831	10,093	9,122	10,152	12,811	15,437	13,770
Peternakan	23,420	2,001	2,196	2,188	2,277	2,000	1,814	1,548	1,399	1,557	1,964	2,367	2,111
Perikanan Budidaya	44,711	3,819	4,192	4,177	4,346	3,818	3,463	2,955	2,670	2,972	3,750	4,519	4,031
<b>JUMLAH</b>	<b>850,000</b>	<b>72,611</b>	<b>79,698</b>	<b>79,401</b>	<b>82,625</b>	<b>72,579</b>	<b>65,838</b>	<b>56,169</b>	<b>50,761</b>	<b>56,493</b>	<b>71,294</b>	<b>85,903</b>	<b>76,628</b>

**Jenis Pupuk : ZA**

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	641,486	58,375	53,885	53,243	59,658	53,885	50,036	49,394	48,111	50,036	51,319	56,451	57,092
Hortikultura	49,050	4,464	4,120	4,071	4,562	4,120	3,826	3,777	3,679	3,826	3,924	4,316	4,365
Perkebunan	280,010	25,481	23,521	23,241	26,041	23,521	21,841	21,561	21,001	21,841	22,401	24,641	24,921
Peternakan	24,883	2,264	2,090	2,065	2,314	2,090	1,941	1,916	1,866	1,941	1,991	2,190	2,215
Perikanan Budidaya	4,571	416	384	379	425	384	357	352	343	357	366	402	407
<b>JUMLAH</b>	<b>1,000,000</b>	<b>91,000</b>	<b>84,000</b>	<b>83,000</b>	<b>93,000</b>	<b>84,000</b>	<b>78,000</b>	<b>77,000</b>	<b>75,000</b>	<b>78,000</b>	<b>80,000</b>	<b>88,000</b>	<b>89,000</b>

**Jenis Pupuk : NPK**

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	1,628,294	148,175	136,777	135,148	151,431	136,777	127,007	125,379	122,122	127,007	130,264	143,290	144,918
Hortikultura	240,859	21,918	20,232	19,991	22,400	20,232	18,787	18,546	18,064	18,787	19,269	21,196	21,436
Perkebunan	460,712	41,925	38,700	38,239	42,846	38,700	35,936	35,475	34,553	35,936	36,857	40,543	41,003
Peternakan	44,402	4,041	3,730	3,685	4,129	3,730	3,463	3,419	3,330	3,463	3,552	3,907	3,952
Perikanan Budidaya	25,732	2,342	2,162	2,136	2,393	2,162	2,007	1,981	1,930	2,007	2,059	2,264	2,290
<b>JUMLAH</b>	<b>2,400,000</b>	<b>218,400</b>	<b>201,600</b>	<b>199,200</b>	<b>223,200</b>	<b>201,600</b>	<b>187,200</b>	<b>184,800</b>	<b>180,000</b>	<b>187,200</b>	<b>192,000</b>	<b>211,200</b>	<b>213,600</b>

**Jenis Pupuk : ORGANIK**

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	687,513	62,564	57,751	57,064	63,939	57,751	53,626	52,938	51,563	53,626	55,001	60,501	61,189
Hortikultura	60,959	5,547	5,121	5,060	5,669	5,121	4,755	4,694	4,572	4,755	4,877	5,364	5,425
Perkebunan	109,934	10,004	9,234	9,125	10,224	9,234	8,575	8,465	8,245	8,575	8,795	9,674	9,784
Peternakan	19,500	1,775	1,638	1,619	1,814	1,638	1,521	1,502	1,463	1,521	1,560	1,716	1,736
Perikanan Budidaya	22,094	2,011	1,856	1,834	2,055	1,856	1,723	1,701	1,657	1,723	1,768	1,944	1,966
<b>JUMLAH</b>	<b>900,000</b>	<b>81,900</b>	<b>75,600</b>	<b>74,700</b>	<b>83,700</b>	<b>75,600</b>	<b>70,200</b>	<b>69,300</b>	<b>67,500</b>	<b>70,200</b>	<b>72,000</b>	<b>79,200</b>	<b>80,100</b>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Nopember 2012

MENTERI PERTANIAN,

Ttd.

SUSWONO



Lampiran 3.1. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

(Ton)														
NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	70,000	6,701	5,290	6,255	6,553	6,672	4,492	4,385	3,571	4,678	5,350	7,491	8,561
2	SUMATERA UTARA	160,000	15,317	12,092	14,298	14,979	15,250	10,266	10,024	8,163	10,692	12,230	17,121	19,567
3	SUMATERA BARAT	76,000	7,275	5,744	6,792	7,115	7,244	4,877	4,761	3,877	5,079	5,809	8,133	9,294
4	J A M B I	31,000	2,968	2,343	2,770	2,902	2,955	1,989	1,942	1,582	2,072	2,369	3,317	3,791
5	R I A U	32,000	3,063	2,418	2,860	2,996	3,050	2,053	2,005	1,633	2,138	2,446	3,424	3,913
6	BENGGKULU	26,000	2,489	1,965	2,323	2,434	2,478	1,668	1,629	1,327	1,738	1,987	2,782	3,180
7	SUMATERA SELATAN	150,000	14,359	11,336	13,405	14,043	14,297	9,625	9,397	7,653	10,024	11,465	16,051	18,344
8	BANGKA BELITUNG	18,000	1,723	1,360	1,609	1,685	1,716	1,155	1,128	918	1,203	1,376	1,926	2,201
9	LAMPUNG	248,000	23,741	18,743	22,162	23,217	23,638	15,913	15,537	12,653	16,573	18,956	26,538	30,329
10	KEP. RIAU	500	48	38	45	47	48	32	31	26	33	38	54	61
11	DKI. JAKARTA	500	48	38	45	47	48	32	31	26	33	38	54	61
12	BANTEN	60,000	5,744	4,534	5,362	5,617	5,719	3,850	3,759	3,061	4,010	4,586	6,421	7,338
13	JAWA BARAT	720,000	68,925	54,414	64,342	67,405	68,626	46,199	45,108	36,734	48,116	55,033	77,046	88,053
14	D.I. YOGYAKARTA	42,000	4,021	3,174	3,753	3,932	4,003	2,695	2,631	2,143	2,807	3,210	4,494	5,136
15	JAWA TENGAH	794,000	76,009	60,007	70,955	74,332	75,679	50,947	49,744	40,509	53,061	60,689	84,965	97,103
16	JAWA TIMUR	1,000,000	95,729	75,575	89,364	93,618	95,313	64,165	62,650	51,019	66,828	76,435	107,009	122,295
17	B A L I	43,000	4,116	3,250	3,843	4,026	4,098	2,759	2,694	2,194	2,874	3,287	4,601	5,259
18	KALIMANTAN BARAT	31,000	2,968	2,343	2,770	2,902	2,955	1,989	1,942	1,582	2,072	2,369	3,317	3,791
19	KALIMANTAN TENGAH	15,000	1,436	1,134	1,340	1,404	1,430	962	940	765	1,002	1,147	1,605	1,834
20	KALIMANTAN SELATAN	39,000	3,733	2,947	3,485	3,651	3,717	2,502	2,443	1,990	2,606	2,981	4,173	4,770
21	KALIMANTAN TIMUR	16,000	1,532	1,209	1,430	1,498	1,525	1,027	1,002	816	1,069	1,223	1,712	1,957
22	SULAWESI UTARA	20,000	1,915	1,511	1,787	1,872	1,906	1,283	1,253	1,020	1,337	1,529	2,140	2,446
23	GORONTALO	15,000	1,436	1,134	1,340	1,404	1,430	962	940	765	1,002	1,147	1,605	1,834
24	SULAWESI TENGAH	29,000	2,776	2,192	2,592	2,715	2,764	1,861	1,817	1,480	1,938	2,217	3,103	3,547
25	SULAWESI TENGGARA	19,000	1,819	1,436	1,698	1,779	1,811	1,219	1,190	969	1,270	1,452	2,033	2,324
26	SULAWESI SELATAN	262,500	25,129	19,838	23,458	24,575	25,020	16,843	16,446	13,393	17,542	20,064	28,090	32,103
27	SULAWESI BARAT	23,000	2,202	1,738	2,055	2,153	2,192	1,476	1,441	1,173	1,537	1,758	2,461	2,813
28	NUSA TENGGARA BARAT	126,000	12,062	9,522	11,260	11,796	12,009	8,085	7,894	6,428	8,420	9,631	13,483	15,409
29	NUSA TENGGARA TIMUR	24,000	2,298	1,814	2,145	2,247	2,288	1,540	1,504	1,224	1,604	1,834	2,568	2,935
30	MALUKU	2,000	191	151	179	187	191	128	125	102	134	153	214	245
31	PAPUA	5,000	479	378	447	468	477	321	313	255	334	382	535	611
32	MALUKU UTARA	1,100	105	83	98	103	105	71	69	56	74	84	118	135
33	PAPUA BARAT	1,400	134	106	125	131	133	90	88	71	94	107	150	171
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>4,100,000</b>	<b>392,490</b>	<b>309,857</b>	<b>366,393</b>	<b>383,832</b>	<b>390,785</b>	<b>263,078</b>	<b>256,864</b>	<b>209,179</b>	<b>273,993</b>	<b>313,382</b>	<b>438,735</b>	<b>501,411</b>

Lampiran 3.2. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Tanaman Pangan**

(Ton)

No.	Propinsi	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	42,000	4,021	3,174	3,753	3,932	4,003	2,695	2,631	2,143	2,807	3,210	4,494	5,136
2	SUMATERA UTARA	112,000	10,722	8,464	10,009	10,485	10,675	7,187	7,017	5,714	7,485	8,561	11,985	13,697
3	SUMATERA BARAT	53,200	5,093	4,021	4,754	4,980	5,071	3,414	3,333	2,714	3,555	4,066	5,693	6,506
4	J A M B I	15,190	1,454	1,148	1,357	1,422	1,448	975	952	775	1,015	1,161	1,625	1,858
5	R I A U	16,000	1,532	1,209	1,430	1,498	1,525	1,027	1,002	816	1,069	1,223	1,712	1,957
6	BENGGKULU	17,680	1,692	1,336	1,580	1,655	1,685	1,134	1,108	902	1,182	1,351	1,892	2,162
7	SUMATERA SELATAN	45,000	4,308	3,401	4,021	4,213	4,289	2,887	2,819	2,296	3,007	3,440	4,815	5,503
8	BANGKA BELITUNG	7,740	741	585	692	725	738	497	485	395	517	592	828	947
9	LAMPUNG	173,600	16,619	13,120	15,514	16,252	16,546	11,139	10,876	8,857	11,601	13,269	18,577	21,230
10	KEP. RIAU	250	24	19	22	23	24	16	16	13	17	19	27	31
11	DKI. JAKARTA	455	44	34	41	43	43	29	29	23	30	35	49	56
12	BANTEN	36,000	3,446	2,721	3,217	3,370	3,431	2,310	2,255	1,837	2,406	2,752	3,852	4,403
13	JAWA BARAT	504,000	48,248	38,090	45,040	47,183	48,038	32,339	31,575	25,714	33,681	38,523	53,932	61,637
14	D.I. YOGYAKARTA	33,600	3,217	2,539	3,003	3,146	3,203	2,156	2,105	1,714	2,245	2,568	3,595	4,109
15	JAWA TENGAH	555,800	53,206	42,005	49,669	52,033	52,975	35,663	34,821	28,357	37,143	42,482	59,475	67,972
16	JAWA TIMUR	900,000	86,156	68,017	80,428	84,256	85,782	57,749	56,385	45,917	60,145	68,791	96,308	110,066
17	B A L I	32,680	3,128	2,470	2,920	3,059	3,115	2,097	2,047	1,667	2,184	2,498	3,497	3,997
18	KALIMANTAN BARAT	20,150	1,929	1,523	1,801	1,886	1,921	1,293	1,262	1,028	1,347	1,540	2,156	2,464
19	KALIMANTAN TENGAH	3,750	359	283	335	351	357	241	235	191	251	287	401	459
20	KALIMANTAN SELATAN	30,810	2,949	2,328	2,753	2,884	2,937	1,977	1,930	1,572	2,059	2,355	3,297	3,768
21	KALIMANTAN TIMUR	9,920	950	750	886	929	946	637	621	506	663	758	1,062	1,213
22	SULAWESI UTARA	14,400	1,379	1,088	1,287	1,348	1,373	924	902	735	962	1,101	1,541	1,761
23	GORONTALO	11,250	1,077	850	1,005	1,053	1,072	722	705	574	752	860	1,204	1,376
24	SULAWESI TENGAH	18,560	1,777	1,403	1,659	1,738	1,769	1,191	1,163	947	1,240	1,419	1,986	2,270
25	SULAWESI TENGGARA	12,350	1,182	933	1,104	1,156	1,177	792	774	630	825	944	1,322	1,510
26	SULAWESI SELATAN	170,625	16,334	12,895	15,248	15,974	16,263	10,948	10,690	8,705	11,402	13,042	18,258	20,867
27	SULAWESI BARAT	13,800	1,321	1,043	1,233	1,292	1,315	885	865	704	922	1,055	1,477	1,688
28	NUSA TENGGARA BARAT	103,320	9,891	7,808	9,233	9,673	9,848	6,630	6,473	5,271	6,905	7,897	11,056	12,636
29	NUSA TENGGARA TIMUR	16,800	1,608	1,270	1,501	1,573	1,601	1,078	1,053	857	1,123	1,284	1,798	2,055
30	MALUKU	1,260	121	95	113	118	120	81	79	64	84	96	135	154
31	PAPUA	3,100	297	234	277	290	295	199	194	158	207	237	332	379
32	MALUKU UTARA	528	51	40	47	49	50	34	33	27	35	40	57	65
33	PAPUA BARAT	882	84	67	79	83	84	57	55	45	59	67	94	108
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>2,976,700</b>	<b>284,957</b>	<b>224,964</b>	<b>266,010</b>	<b>278,672</b>	<b>283,719</b>	<b>191,001</b>	<b>186,490</b>	<b>151,869</b>	<b>198,925</b>	<b>227,523</b>	<b>318,532</b>	<b>364,037</b>



Lampiran 3.3. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Hortikultura**

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	3,500	335	265	313	328	334	225	219	179	234	268	375	428
2	SUMATERA UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUMATERA BARAT	3,800	364	287	340	356	362	244	238	194	254	290	407	465
4	J A M B I	4,650	445	351	416	435	443	298	291	237	311	355	498	569
5	R I A U	4,800	460	363	429	449	458	308	301	245	321	367	514	587
6	BENGGKULU	2,600	249	196	232	243	248	167	163	133	174	199	278	318
7	SUMATERA SELATAN	15,000	1,436	1,134	1,340	1,404	1,430	962	940	765	1,002	1,147	1,605	1,834
8	BANGKA BELITUNG	1,080	103	82	97	101	103	69	68	55	72	83	116	132
9	LAMPUNG	4,960	475	375	443	464	473	318	311	253	331	379	531	607
10	KEP. RIAU	75	7	6	7	7	7	5	5	4	5	6	8	9
11	DKI. JAKARTA	45	4	3	4	4	4	3	3	2	3	3	5	6
12	BANTEN	3,000	287	227	268	281	286	192	188	153	200	229	321	367
13	JAWA BARAT	72,000	6,893	5,441	6,434	6,740	6,863	4,620	4,511	3,673	4,812	5,503	7,705	8,805
14	D.I. YOGYAKARTA	4,200	402	317	375	393	400	269	263	214	281	321	449	514
15	JAWA TENGAH	55,580	5,321	4,200	4,967	5,203	5,298	3,566	3,482	2,836	3,714	4,248	5,948	6,797
16	JAWA TIMUR	10,000	957	756	894	936	953	642	626	510	668	764	1,070	1,223
17	B A L I	3,010	288	227	269	282	287	193	189	154	201	230	322	368
18	KALIMANTAN BARAT	2,790	267	211	249	261	266	179	175	142	186	213	299	341
19	KALIMANTAN TENGAH	1,200	115	91	107	112	114	77	75	61	80	92	128	147
20	KALIMANTAN SELATAN	390	37	29	35	37	37	25	24	20	26	30	42	48
21	KALIMANTAN TIMUR	960	92	73	86	90	92	62	60	49	64	73	103	117
22	SULAWESI UTARA	1,800	172	136	161	169	172	115	113	92	120	138	193	220
23	GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SULAWESI TENGAH	2,610	250	197	233	244	249	167	164	133	174	199	279	319
25	SULAWESI TENGGARA	1,710	164	129	153	160	163	110	107	87	114	131	183	209
26	SULAWESI SELATAN	23,625	2,262	1,785	2,111	2,212	2,252	1,516	1,480	1,205	1,579	1,806	2,528	2,889
27	SULAWESI BARAT	1,150	110	87	103	108	110	74	72	59	77	88	123	141
28	NUSA TENGGARA BARAT	6,300	603	476	563	590	600	404	395	321	421	482	674	770
29	NUSA TENGGARA TIMUR	3,120	299	236	279	292	297	200	195	159	209	238	334	382
30	MALUKU	160	15	12	14	15	15	10	10	8	11	12	17	20
31	PAPUA	600	57	45	54	56	57	38	38	31	40	46	64	73
32	MALUKU UTARA	176	17	13	16	16	17	11	11	9	12	13	19	22
33	PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>234,891</b>	<b>22,486</b>	<b>17,752</b>	<b>20,991</b>	<b>21,990</b>	<b>22,388</b>	<b>15,072</b>	<b>14,716</b>	<b>11,984</b>	<b>15,697</b>	<b>17,954</b>	<b>25,135</b>	<b>28,726</b>

Lampiran 3.4. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Perkebunan**

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	17,500	1,675	1,323	1,564	1,638	1,668	1,123	1,096	893	1,169	1,338	1,873	2,140
2	SUMATERA UTARA	32,000	3,063	2,418	2,860	2,996	3,050	2,053	2,005	1,633	2,138	2,446	3,424	3,913
3	SUMATERA BARAT	11,400	1,091	862	1,019	1,067	1,087	731	714	582	762	871	1,220	1,394
4	J A M B I	9,610	920	726	859	900	916	617	602	490	642	735	1,028	1,175
5	R I A U	8,000	766	605	715	749	763	513	501	408	535	611	856	978
6	BENGGKULU	3,120	299	236	279	292	297	200	195	159	209	238	334	382
7	SUMATERA SELATAN	67,500	6,462	5,101	6,032	6,319	6,434	4,331	4,229	3,444	4,511	5,159	7,223	8,255
8	BANGKA BELITUNG	7,380	706	558	660	691	703	474	462	377	493	564	790	903
9	LAMPUNG	57,040	5,460	4,311	5,097	5,340	5,437	3,660	3,574	2,910	3,812	4,360	6,104	6,976
10	KEP. RIAU	50	5	4	4	5	5	3	3	3	3	4	5	6
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	15,000	1,436	1,134	1,340	1,404	1,430	962	940	765	1,002	1,147	1,605	1,834
13	JAWA BARAT	72,000	6,893	5,441	6,434	6,740	6,863	4,620	4,511	3,673	4,812	5,503	7,705	8,805
14	D.I. YOGYAKARTA	1,260	121	95	113	118	120	81	79	64	84	96	135	154
15	JAWA TENGAH	142,920	13,682	10,801	12,772	13,380	13,622	9,171	8,954	7,292	9,551	10,924	15,294	17,478
16	JAWA TIMUR	50,000	4,786	3,779	4,468	4,681	4,766	3,208	3,132	2,551	3,341	3,822	5,350	6,115
17	B A L I	6,020	576	455	538	564	574	386	377	307	402	460	644	736
18	KALIMANTAN BARAT	6,820	653	515	609	638	650	438	427	348	456	521	730	834
19	KALIMANTAN TENGAH	9,600	919	726	858	899	915	616	601	490	642	734	1,027	1,174
20	KALIMANTAN SELATAN	6,630	635	501	592	621	632	425	415	338	443	507	709	811
21	KALIMANTAN TIMUR	4,480	429	339	400	419	427	287	281	229	299	342	479	548
22	SULAWESI UTARA	2,600	249	196	232	243	248	167	163	133	174	199	278	318
23	GORONTALO	3,000	287	227	268	281	286	192	188	153	200	229	321	367
24	SULAWESI TENGAH	6,380	611	482	570	597	608	409	400	326	426	488	683	780
25	SULAWESI TENGGARA	4,180	400	316	374	391	398	268	262	213	279	319	447	511
26	SULAWESI SELATAN	57,750	5,528	4,364	5,161	5,406	5,504	3,706	3,618	2,946	3,859	4,414	6,180	7,063
27	SULAWESI BARAT	5,750	550	435	514	538	548	369	360	293	384	439	615	703
28	NUSA TENGGARA BARAT	12,600	1,206	952	1,126	1,180	1,201	808	789	643	842	963	1,348	1,541
29	NUSA TENGGARA TIMUR	2,400	230	181	214	225	229	154	150	122	160	183	257	294
30	MALUKU	520	50	39	46	49	50	33	33	27	35	40	56	64
31	PAPUA	800	77	60	71	75	76	51	50	41	53	61	86	98
32	MALUKU UTARA	264	25	20	24	25	25	17	17	13	18	20	28	32
33	PAPUA BARAT	518	50	39	46	48	49	33	32	26	35	40	55	63
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>625,092</b>	<b>59,840</b>	<b>47,241</b>	<b>55,861</b>	<b>58,520</b>	<b>59,580</b>	<b>40,109</b>	<b>39,162</b>	<b>31,892</b>	<b>41,773</b>	<b>47,779</b>	<b>66,890</b>	<b>76,446</b>

Lampiran 3.5. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Peternakan**

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	3,500	335	265	313	328	334	225	219	179	234	268	375	428
2	SUMATERA UTARA	8,000	766	605	715	749	763	513	501	408	535	611	856	978
3	SUMATERA BARAT	3,800	364	287	340	356	362	244	238	194	254	290	407	465
4	J A M B I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	R I A U	960	92	73	86	90	92	62	60	49	64	73	103	117
6	BENGGKULU	1,040	100	79	93	97	99	67	65	53	70	79	111	127
7	SUMATERA SELATAN	7,500	718	567	670	702	715	481	470	383	501	573	803	917
8	BANGKA BELITUNG	900	86	68	80	84	86	58	56	46	60	69	96	110
9	LAMPUNG	4,960	475	375	443	464	473	318	311	253	331	379	531	607
10	KEP. RIAU	100	10	8	9	9	10	6	6	5	7	8	11	12
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	3,000	287	227	268	281	286	192	188	153	200	229	321	367
13	JAWA BARAT	36,000	3,446	2,721	3,217	3,370	3,431	2,310	2,255	1,837	2,406	2,752	3,852	4,403
14	D.I. YOGYAKARTA	2,940	281	222	263	275	280	189	184	150	196	225	315	360
15	JAWA TENGAH	23,820	2,280	1,800	2,129	2,230	2,270	1,528	1,492	1,215	1,592	1,821	2,549	2,913
16	JAWA TIMUR	10,000	957	756	894	936	953	642	626	510	668	764	1,070	1,223
17	B A L I	860	82	65	77	81	82	55	54	44	57	66	92	105
18	KALIMANTAN BARAT	930	89	70	83	87	89	60	58	47	62	71	100	114
19	KALIMANTAN TENGAH	150	14	11	13	14	14	10	9	8	10	11	16	18
20	KALIMANTAN SELATAN	390	37	29	35	37	37	25	24	20	26	30	42	48
21	KALIMANTAN TIMUR	160	15	12	14	15	15	10	10	8	11	12	17	20
22	SULAWESI UTARA	600	57	45	54	56	57	38	38	31	40	46	64	73
23	GORONTALO	150	14	11	13	14	14	10	9	8	10	11	16	18
24	SULAWESI TENGAH	1,160	111	88	104	109	111	74	73	59	78	89	124	142
25	SULAWESI TENGGARA	190	18	14	17	18	18	12	12	10	13	15	20	23
26	SULAWESI SELATAN	7,875	754	595	704	737	751	505	493	402	526	602	843	963
7	SULAWESI BARAT	1,150	110	87	103	108	110	74	72	59	77	88	123	141
28	NUSA TENGGARA BARAT	1,260	121	95	113	118	120	81	79	64	84	96	135	154
29	NUSA TENGGARA TIMUR	1,200	115	91	107	112	114	77	75	61	80	92	128	147
30	MALUKU	20	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2
31	PAPUA	400	38	30	36	37	38	26	25	20	27	31	43	49
32	MALUKU UTARA	132	13	10	12	12	13	8	8	7	9	10	14	16
33	PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>123,147</b>	<b>11,789</b>	<b>9,307</b>	<b>11,005</b>	<b>11,529</b>	<b>11,738</b>	<b>7,902</b>	<b>7,715</b>	<b>6,283</b>	<b>8,230</b>	<b>9,413</b>	<b>13,178</b>	<b>15,060</b>

Lampiran 3.6. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Perikanan Budidaya**

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	3,500	335	265	313	328	334	225	219	179	234	268	375	428
2	SUMATERA UTARA	8,000	766	605	715	749	763	513	501	408	535	611	856	978
3	SUMATERA BARAT	3,800	364	287	340	356	362	244	238	194	254	290	407	465
4	J A M B I	1,550	148	117	139	145	148	99	97	79	104	118	166	190
5	R I A U	2,240	214	169	200	210	214	144	140	114	150	171	240	274
6	BENGGKULU	1,560	149	118	139	146	149	100	98	80	104	119	167	191
7	SUMATERA SELATAN	15,000	1,436	1,134	1,340	1,404	1,430	962	940	765	1,002	1,147	1,605	1,834
8	BANGKA BELITUNG	900	86	68	80	84	86	58	56	46	60	69	96	110
9	LAMPUNG	7,440	712	562	665	697	709	477	466	380	497	569	796	910
10	KEP. RIAU	25	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3	3
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	3,000	287	227	268	281	286	192	188	153	200	229	321	367
13	JAWA BARAT	36,000	3,446	2,721	3,217	3,370	3,431	2,310	2,255	1,837	2,406	2,752	3,852	4,403
14	D.I. YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TENGAH	15,880	1,520	1,200	1,419	1,487	1,514	1,019	995	810	1,061	1,214	1,699	1,942
16	JAWA TIMUR	30,000	2,872	2,267	2,681	2,809	2,859	1,925	1,879	1,531	2,005	2,293	3,210	3,669
17	B A L I	430	41	32	38	40	41	28	27	22	29	33	46	53
18	KALIMANTAN BARAT	310	30	23	28	29	30	20	19	16	21	24	33	38
19	KALIMANTAN TENGAH	300	29	23	27	28	29	19	19	15	20	23	32	37
20	KALIMANTAN SELATAN	780	75	59	70	73	74	50	49	40	52	60	83	95
21	KALIMANTAN TIMUR	480	46	36	43	45	46	31	30	24	32	37	51	59
22	SULAWESI UTARA	600	57	45	54	56	57	38	38	31	40	46	64	73
23	GORONTALO	600	57	45	54	56	57	38	38	31	40	46	64	73
24	SULAWESI TENGAH	290	28	22	26	27	28	19	18	15	19	22	31	35
25	SULAWESI TENGGARA	570	55	43	51	53	54	37	36	29	38	44	61	70
26	SULAWESI SELATAN	2,625	251	198	235	246	250	168	164	134	175	201	281	321
27	SULAWESI BARAT	1,150	110	87	103	108	110	74	72	59	77	88	123	141
28	NUSA TENGGARA BARAT	2,520	241	190	225	236	240	162	158	129	168	193	270	308
29	NUSA TENGGARA TIMUR	480	46	36	43	45	46	31	30	24	32	37	51	59
30	MALUKU	40	4	3	4	4	4	3	3	2	3	3	4	5
31	PAPUA	100	10	8	9	9	10	6	6	5	7	8	11	12
32	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>140,170</b>	<b>13,418</b>	<b>10,593</b>	<b>12,526</b>	<b>13,122</b>	<b>13,360</b>	<b>8,994</b>	<b>8,782</b>	<b>7,151</b>	<b>9,367</b>	<b>10,714</b>	<b>14,999</b>	<b>17,142</b>

Lampiran 3.7. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

														(Ton)
NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	23,000	1,965	2,157	2,148	2,236	1,964	1,781	1,520	1,374	1,529	1,929	2,324	2,073
2	SUMATERA UTARA	55,000	4,698	5,157	5,138	5,346	4,696	4,260	3,634	3,285	3,655	4,613	5,558	4,958
3	SUMATERA BARAT	34,000	2,904	3,188	3,176	3,305	2,903	2,634	2,247	2,030	2,260	2,852	3,436	3,065
4	J A M B I	20,400	1,743	1,913	1,906	1,983	1,742	1,580	1,348	1,218	1,356	1,711	2,062	1,839
5	R I A U	10,200	871	956	953	992	871	790	674	609	678	856	1,031	920
6	BENGGULU	6,800	581	638	635	661	581	527	449	406	452	570	687	613
7	SUMATERA SELATAN	40,000	3,417	3,751	3,737	3,888	3,416	3,098	2,643	2,389	2,659	3,355	4,043	3,606
8	BANGKA BELITUNG	3,400	290	319	318	331	290	263	225	203	226	285	344	307
9	LAMPUNG	45,000	3,844	4,219	4,204	4,374	3,842	3,486	2,974	2,687	2,991	3,774	4,548	4,057
10	KEP. RIAU	50	4	5	5	5	4	4	3	3	3	4	5	5
11	DKI. JAKARTA	50	4	5	5	5	4	4	3	3	3	4	5	5
12	BANTEN	20,400	1,743	1,913	1,906	1,983	1,742	1,580	1,348	1,218	1,356	1,711	2,062	1,839
13	JAWA BARAT	147,000	12,557	13,783	13,732	14,289	12,552	11,386	9,714	8,779	9,770	12,330	14,856	13,252
14	D.I. YOGYAKARTA	3,400	290	319	318	331	290	263	225	203	226	285	344	307
15	JAWA TENGAH	158,000	13,497	14,814	14,759	15,359	13,491	12,238	10,441	9,436	10,501	13,252	15,968	14,244
16	JAWA TIMUR	160,000	13,668	15,002	14,946	15,553	13,662	12,393	10,573	9,555	10,634	13,420	16,170	14,424
17	B A L I	2,200	188	206	206	214	188	170	145	131	146	185	222	198
18	KALIMANTAN BARAT	14,000	1,196	1,313	1,308	1,361	1,195	1,084	925	836	930	1,174	1,415	1,262
19	KALIMANTAN TENGAH	6,800	581	638	635	661	581	527	449	406	452	570	687	613
20	KALIMANTAN SELATAN	9,000	769	844	841	875	768	697	595	537	598	755	910	811
21	KALIMANTAN TIMUR	6,000	513	563	560	583	512	465	396	358	399	503	606	541
22	SULAWESI UTARA	4,500	384	422	420	437	384	349	297	269	299	377	455	406
23	GORONTALO	1,000	85	94	93	97	85	77	66	60	66	84	101	90
24	SULAWESI TENGAH	3,400	290	319	318	331	290	263	225	203	226	285	344	307
25	SULAWESI TENGGARA	6,800	581	638	635	661	581	527	449	406	452	570	687	613
26	SULAWESI SELATAN	40,000	3,417	3,751	3,737	3,888	3,416	3,098	2,643	2,389	2,659	3,355	4,043	3,606
27	SULAWESI BARAT	2,000	171	188	187	194	171	155	132	119	133	168	202	180
28	NUSA TENGGARA BARAT	20,000	1,709	1,875	1,868	1,944	1,708	1,549	1,322	1,194	1,329	1,678	2,021	1,803
29	NUSA TENGGARA TIMUR	4,500	384	422	420	437	384	349	297	269	299	377	455	406
30	MALUKU	100	9	9	9	10	9	8	7	6	7	8	10	9
31	PAPUA	2,300	196	216	215	224	196	178	152	137	153	193	232	207
32	MALUKU UTARA	300	26	28	28	29	26	23	20	18	20	25	30	27
33	PAPUA BARAT	400	34	38	37	39	34	31	26	24	27	34	40	36
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>850,000</b>	<b>72,611</b>	<b>79,698</b>	<b>79,401</b>	<b>82,625</b>	<b>72,579</b>	<b>65,838</b>	<b>56,169</b>	<b>50,761</b>	<b>56,493</b>	<b>71,294</b>	<b>85,903</b>	<b>76,628</b>

Lampiran 3.8. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Tanaman Pangan**

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	13,800	1,179	1,294	1,289	1,341	1,178	1,069	912	824	917	1,157	1,395	1,244
2	SUMATERA UTARA	38,500	3,289	3,610	3,596	3,742	3,287	2,982	2,544	2,299	2,559	3,229	3,891	3,471
3	SUMATERA BARAT	27,200	2,324	2,550	2,541	2,644	2,323	2,107	1,797	1,624	1,808	2,281	2,749	2,452
4	J A M B I	15,300	1,307	1,435	1,429	1,487	1,306	1,185	1,011	914	1,017	1,283	1,546	1,379
5	R I A U	4,590	392	430	429	446	392	356	303	274	305	385	464	414
6	BENGGULU	5,100	436	478	476	496	435	395	337	305	339	428	515	460
7	SUMATERA SELATAN	12,800	1,093	1,200	1,196	1,244	1,093	991	846	764	851	1,074	1,294	1,154
8	BANGKA BELITUNG	2,040	174	191	191	198	174	158	135	122	136	171	206	184
9	LAMPUNG	27,000	2,306	2,532	2,522	2,625	2,305	2,091	1,784	1,612	1,794	2,265	2,729	2,434
10	KEP. RIAU	16	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1
11	DKI. JAKARTA	39	3	4	4	4	3	3	3	2	3	3	4	3
12	BANTEN	14,280	1,220	1,339	1,334	1,388	1,219	1,106	944	853	949	1,198	1,443	1,287
13	JAWA BARAT	102,900	8,790	9,648	9,612	10,003	8,786	7,970	6,800	6,145	6,839	8,631	10,399	9,276
14	D.I. YOGYAKARTA	2,720	232	255	254	264	232	211	180	162	181	228	275	245
15	JAWA TENGAH	118,500	10,123	11,111	11,069	11,519	10,118	9,179	7,831	7,077	7,876	9,939	11,976	10,683
16	JAWA TIMUR	120,000	10,251	11,252	11,210	11,665	10,247	9,295	7,930	7,166	7,976	10,065	12,128	10,818
17	B A L I	1,254	107	118	117	122	107	97	83	75	83	105	127	113
18	KALIMANTAN BARAT	9,800	837	919	915	953	837	759	648	585	651	822	990	883
19	KALIMANTAN TENGAH	3,808	325	357	356	370	325	295	252	227	253	319	385	343
20	KALIMANTAN SELATAN	6,930	592	650	647	674	592	537	458	414	461	581	700	625
21	KALIMANTAN TIMUR	3,000	256	281	280	292	256	232	198	179	199	252	303	270
22	SULAWESI UTARA	1,845	158	173	172	179	158	143	122	110	123	155	186	166
23	GORONTALO	690	59	65	64	67	59	53	46	41	46	58	70	62
24	SULAWESI TENGAH	1,938	166	182	181	188	165	150	128	116	129	163	196	175
25	SULAWESI TENGGARA	3,876	331	363	362	377	331	300	256	231	258	325	392	349
26	SULAWESI SELATAN	22,800	1,948	2,138	2,130	2,216	1,947	1,766	1,507	1,362	1,515	1,912	2,304	2,055
27	SULAWESI BARAT	1,400	120	131	131	136	120	108	93	84	93	117	141	126
28	NUSA TENGGARA BARAT	15,000	1,281	1,406	1,401	1,458	1,281	1,162	991	896	997	1,258	1,516	1,352
29	NUSA TENGGARA TIMUR	3,150	269	295	294	306	269	244	208	188	209	264	318	284
30	MALUKU	64	5	6	6	6	5	5	4	4	4	5	6	6
31	PAPUA	1,403	120	132	131	136	120	109	93	84	93	118	142	126
32	MALUKU UTARA	198	17	19	18	19	17	15	13	12	13	17	20	18
33	PAPUA BARAT	336	29	32	31	33	29	26	22	20	22	28	34	30
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>582,277</b>	<b>49,741</b>	<b>54,596</b>	<b>54,392</b>	<b>56,601</b>	<b>49,719</b>	<b>45,101</b>	<b>38,478</b>	<b>34,773</b>	<b>38,700</b>	<b>48,838</b>	<b>58,846</b>	<b>52,492</b>

Lampiran 3.9. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Hortikultura**

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	1,150	98	108	107	112	98	89	76	69	76	96	116	104
2	SUMATERA UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUMATERA BARAT	1,700	145	159	159	165	145	132	112	102	113	143	172	153
4	J A M B I	1,020	87	96	95	99	87	79	67	61	68	86	103	92
5	R I A U	1,020	87	96	95	99	87	79	67	61	68	86	103	92
6	BENGGKULU	340	29	32	32	33	29	26	22	20	23	29	34	31
7	SUMATERA SELATAN	4,000	342	375	374	389	342	310	264	239	266	336	404	361
8	BANGKA BELITUNG	102	9	10	10	10	9	8	7	6	7	9	10	9
9	LAMPUNG	4,500	384	422	420	437	384	349	297	269	299	377	455	406
10	KEP. RIAU	20	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2
11	DKI. JAKARTA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	BANTEN	3,060	261	287	286	297	261	237	202	183	203	257	309	276
13	JAWA BARAT	14,700	1,256	1,378	1,373	1,429	1,255	1,139	971	878	977	1,233	1,486	1,325
14	D.I. YOGYAKARTA	408	35	38	38	40	35	32	27	24	27	34	41	37
15	JAWA TENGAH	1,580	135	148	148	154	135	122	104	94	105	133	160	142
16	JAWA TIMUR	1,600	137	150	149	156	137	124	106	96	106	134	162	144
17	B A L I	374	32	35	35	36	32	29	25	22	25	31	38	34
18	KALIMANTAN BARAT	560	48	53	52	54	48	43	37	33	37	47	57	50
19	KALIMANTAN TENGAH	476	41	45	44	46	41	37	31	28	32	40	48	43
20	KALIMANTAN SELATAN	90	8	8	8	9	8	7	6	5	6	8	9	8
21	KALIMANTAN TIMUR	540	46	51	50	52	46	42	36	32	36	45	55	49
22	SULAWESI UTARA	585	50	55	55	57	50	45	39	35	39	49	59	53
23	GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SULAWESI TENGAH	136	12	13	13	13	12	11	9	8	9	11	14	12
25	SULAWESI TENGGARA	340	29	32	32	33	29	26	22	20	23	29	34	31
26	SULAWESI SELATAN	6,800	581	638	635	661	581	527	449	406	452	570	687	613
27	SULAWESI BARAT	200	17	19	19	19	17	15	13	12	13	17	20	18
28	NUSA TENGGARA BARAT	600	51	56	56	58	51	46	40	36	40	50	61	54
29	NUSA TENGGARA TIMUR	585	50	55	55	57	50	45	39	35	39	49	59	53
30	MALUKU	25	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3	2
31	PAPUA	276	24	26	26	27	24	21	18	16	18	23	28	25
32	MALUKU UTARA	51	4	5	5	5	4	4	3	3	3	4	5	5
33	PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>46,850</b>	<b>4,002</b>	<b>4,393</b>	<b>4,376</b>	<b>4,554</b>	<b>4,000</b>	<b>3,629</b>	<b>3,096</b>	<b>2,798</b>	<b>3,114</b>	<b>3,930</b>	<b>4,735</b>	<b>4,223</b>

Lampiran 3.10. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Perkebunan**

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	5,750	491	539	537	559	491	445	380	343	382	482	581	518
2	SUMATERA UTARA	8,250	705	774	771	802	704	639	545	493	548	692	834	744
3	SUMATERA BARAT	2,380	203	223	222	231	203	184	157	142	158	200	241	215
4	J A M B I	4,080	349	383	381	397	348	316	270	244	271	342	412	368
5	R I A U	3,570	305	335	333	347	305	277	236	213	237	299	361	322
6	BENGGKULU	1,020	87	96	95	99	87	79	67	61	68	86	103	92
7	SUMATERA SELATAN	20,000	1,709	1,875	1,868	1,944	1,708	1,549	1,322	1,194	1,329	1,678	2,021	1,803
8	BANGKA BELITUNG	1,020	87	96	95	99	87	79	67	61	68	86	103	92
9	LAMPUNG	11,250	961	1,055	1,051	1,094	961	871	743	672	748	944	1,137	1,014
10	KEP. RIAU	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	1,020	87	96	95	99	87	79	67	61	68	86	103	92
13	JAWA BARAT	14,700	1,256	1,378	1,373	1,429	1,255	1,139	971	878	977	1,233	1,486	1,325
14	D.I. YOGYAKARTA	68	6	6	6	7	6	5	4	4	5	6	7	6
15	JAWA TENGAH	25,280	2,160	2,370	2,361	2,457	2,159	1,958	1,671	1,510	1,680	2,120	2,555	2,279
16	JAWA TIMUR	27,200	2,324	2,550	2,541	2,644	2,323	2,107	1,797	1,624	1,808	2,281	2,749	2,452
17	B A L I	462	39	43	43	45	39	36	31	28	31	39	47	42
18	KALIMANTAN BARAT	2,800	239	263	262	272	239	217	185	167	186	235	283	252
19	KALIMANTAN TENGAH	1,972	168	185	184	192	168	153	130	118	131	165	199	178
20	KALIMANTAN SELATAN	1,620	138	152	151	157	138	125	107	97	108	136	164	146
21	KALIMANTAN TIMUR	2,040	174	191	191	198	174	158	135	122	136	171	206	184
22	SULAWESI UTARA	1,575	135	148	147	153	134	122	104	94	105	132	159	142
23	GORONTALO	220	19	21	21	21	19	17	15	13	15	18	22	20
24	SULAWESI TENGAH	1,054	90	99	98	102	90	82	70	63	70	88	107	95
25	SULAWESI TENGGARA	2,040	174	191	191	198	174	158	135	122	136	171	206	184
26	SULAWESI SELATAN	8,400	718	788	785	817	717	651	555	502	558	705	849	757
27	SULAWESI BARAT	200	17	19	19	19	17	15	13	12	13	17	20	18
28	NUSA TENGGARA BARAT	3,800	325	356	355	369	324	294	251	227	253	319	384	343
29	NUSA TENGGARA TIMUR	450	38	42	42	44	38	35	30	27	30	38	45	41
30	MALUKU	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	PAPUA	391	33	37	37	38	33	30	26	23	26	33	40	35
32	MALUKU UTARA	51	4	5	5	5	4	4	3	3	3	4	5	5
33	PAPUA BARAT	64	5	6	6	6	5	5	4	4	4	5	6	6
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>152,743</b>	<b>13,048</b>	<b>14,322</b>	<b>14,268</b>	<b>14,848</b>	<b>13,042</b>	<b>11,831</b>	<b>10,093</b>	<b>9,122</b>	<b>10,152</b>	<b>12,811</b>	<b>15,437</b>	<b>13,770</b>



Lampiran 3.11. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Peternakan**

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	1,150	98	108	107	112	98	89	76	69	76	96	116	104
2	SUMATERA UTARA	2,750	235	258	257	267	235	213	182	164	183	231	278	248
3	SUMATERA BARAT	1,020	87	96	95	99	87	79	67	61	68	86	103	92
4	J A M B I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	R I A U	306	26	29	29	30	26	24	20	18	20	26	31	28
6	BENGGKULU	136	12	13	13	13	12	11	9	8	9	11	14	12
7	SUMATERA SELATAN	1,200	103	113	112	117	102	93	79	72	80	101	121	108
8	BANGKA BELITUNG	68	6	6	6	7	6	5	4	4	5	6	7	6
9	LAMPUNG	1,350	115	127	126	131	115	105	89	81	90	113	136	122
10	KEP. RIAU	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	1,020	87	96	95	99	87	79	67	61	68	86	103	92
13	JAWA BARAT	7,350	628	689	687	714	628	569	486	439	488	616	743	663
14	D.I. YOGYAKARTA	204	17	19	19	20	17	16	13	12	14	17	21	18
15	JAWA TENGAH	1,580	135	148	148	154	135	122	104	94	105	133	160	142
16	JAWA TIMUR	3,200	273	300	299	311	273	248	211	191	213	268	323	288
17	B A L I	22	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2
18	KALIMANTAN BARAT	140	12	13	13	14	12	11	9	8	9	12	14	13
19	KALIMANTAN TENGAH	136	12	13	13	13	12	11	9	8	9	11	14	12
20	KALIMANTAN SELATAN	90	8	8	8	9	8	7	6	5	6	8	9	8
21	KALIMANTAN TIMUR	120	10	11	11	12	10	9	8	7	8	10	12	11
22	SULAWESI UTARA	315	27	30	29	31	27	24	21	19	21	26	32	28
23	GORONTALO	70	6	7	7	7	6	5	5	4	5	6	7	6
24	SULAWESI TENGAH	34	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3
25	SULAWESI TENGGARA	68	6	6	6	7	6	5	4	4	5	6	7	6
26	SULAWESI SELATAN	400	34	38	37	39	34	31	26	24	27	34	40	36
27	SULAWESI BARAT	100	9	9	9	10	9	8	7	6	7	8	10	9
28	NUSA TENGGARA BARAT	200	17	19	19	19	17	15	13	12	13	17	20	18
29	NUSA TENGGARA TIMUR	225	19	21	21	22	19	17	15	13	15	19	23	20
30	MALUKU	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	PAPUA	161	14	15	15	16	14	12	11	10	11	14	16	15
32	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>23,420</b>	<b>2,001</b>	<b>2,196</b>	<b>2,188</b>	<b>2,277</b>	<b>2,000</b>	<b>1,814</b>	<b>1,548</b>	<b>1,399</b>	<b>1,557</b>	<b>1,964</b>	<b>2,367</b>	<b>2,111</b>

Lampiran 3.12. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Perikanan Budidaya**

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	1,150	98	108	107	112	98	89	76	69	76	96	116	104
2	SUMATERA UTARA	5,500	470	516	514	535	470	426	363	328	366	461	556	496
3	SUMATERA BARAT	1,700	145	159	159	165	145	132	112	102	113	143	172	153
4	J A M B I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	R I A U	714	61	67	67	69	61	55	47	43	47	60	72	64
6	BENGGKULU	204	17	19	19	20	17	16	13	12	14	17	21	18
7	SUMATERA SELATAN	2,000	171	188	187	194	171	155	132	119	133	168	202	180
8	BANGKA BELITUNG	170	15	16	16	17	15	13	11	10	11	14	17	15
9	LAMPUNG	900	77	84	84	87	77	70	59	54	60	75	91	81
10	KEP. RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	1,020	87	96	95	99	87	79	67	61	68	86	103	92
13	JAWA BARAT	7,350	628	689	687	714	628	569	486	439	488	616	743	663
14	D.I. YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TENGAH	11,060	945	1,037	1,033	1,075	944	857	731	660	735	928	1,118	997
16	JAWA TIMUR	8,000	683	750	747	778	683	620	529	478	532	671	809	721
17	B A L I	88	8	8	8	9	8	7	6	5	6	7	9	8
18	KALIMANTAN BARAT	700	60	66	65	68	60	54	46	42	47	59	71	63
19	KALIMANTAN TENGAH	408	35	38	38	40	35	32	27	24	27	34	41	37
20	KALIMANTAN SELATAN	270	23	25	25	26	23	21	18	16	18	23	27	24
21	KALIMANTAN TIMUR	300	26	28	28	29	26	23	20	18	20	25	30	27
22	SULAWESI UTARA	180	15	17	17	17	15	14	12	11	12	15	18	16
23	GORONTALO	20	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2
24	SULAWESI TENGAH	238	20	22	22	23	20	18	16	14	16	20	24	21
25	SULAWESI TENGGARA	476	41	45	44	46	41	37	31	28	32	40	48	43
26	SULAWESI SELATAN	1,600	137	150	149	156	137	124	106	96	106	134	162	144
27	SULAWESI BARAT	100	9	9	9	10	9	8	7	6	7	8	10	9
28	NUSA TENGGARA BARAT	400	34	38	37	39	34	31	26	24	27	34	40	36
29	NUSA TENGGARA TIMUR	90	8	8	8	9	8	7	6	5	6	8	9	8
30	MALUKU	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	PAPUA	69	6	6	6	7	6	5	5	4	5	6	7	6
32	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PROPINSI</b>	<b>44,711</b>	<b>3,819</b>	<b>4,192</b>	<b>4,177</b>	<b>4,346</b>	<b>3,818</b>	<b>3,463</b>	<b>2,955</b>	<b>2,670</b>	<b>2,972</b>	<b>3,750</b>	<b>4,519</b>	<b>4,031</b>

Lampiran 3.13. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

														(Ton)
NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	12,000	1,092	1,008	996	1,116	1,008	936	924	900	936	960	1,056	1,068
2	SUMATERA UTARA	57,000	5,187	4,788	4,731	5,301	4,788	4,446	4,389	4,275	4,446	4,560	5,016	5,073
3	SUMATERA BARAT	16,000	1,456	1,344	1,328	1,488	1,344	1,248	1,232	1,200	1,248	1,280	1,408	1,424
4	J A M B I	6,700	610	563	556	623	563	523	516	503	523	536	590	596
5	R I A U	7,800	710	655	647	725	655	608	601	585	608	624	686	694
6	BENGGULU	4,400	400	370	365	409	370	343	339	330	343	352	387	392
7	SUMATERA SELATAN	10,000	910	840	830	930	840	780	770	750	780	800	880	890
8	BANGKA BELITUNG	2,000	182	168	166	186	168	156	154	150	156	160	176	178
9	LAMPUNG	23,300	2,120	1,957	1,934	2,167	1,957	1,817	1,794	1,748	1,817	1,864	2,050	2,074
10	KEP. RIAU	50	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
11	DKI. JAKARTA	50	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
12	BANTEN	1,500	137	126	125	140	126	117	116	113	117	120	132	134
13	JAWA BARAT	72,000	6,552	6,048	5,976	6,696	6,048	5,616	5,544	5,400	5,616	5,760	6,336	6,408
14	D.I. YOGYAKARTA	10,000	910	840	830	930	840	780	770	750	780	800	880	890
15	JAWA TENGAH	200,000	18,200	16,800	16,600	18,600	16,800	15,600	15,400	15,000	15,600	16,000	17,600	17,800
16	JAWA TIMUR	464,000	42,224	38,976	38,512	43,152	38,976	36,192	35,728	34,800	36,192	37,120	40,832	41,296
17	B A L I	6,500	592	546	540	605	546	507	501	488	507	520	572	579
18	KALIMANTAN BARAT	3,500	319	294	291	326	294	273	270	263	273	280	308	312
19	KALIMANTAN TENGAH	1,500	137	126	125	140	126	117	116	113	117	120	132	134
20	KALIMANTAN SELATAN	2,200	200	185	183	205	185	172	169	165	172	176	194	196
21	KALIMANTAN TIMUR	2,700	246	227	224	251	227	211	208	203	211	216	238	240
22	SULAWESI UTARA	700	64	59	58	65	59	55	54	53	55	56	62	62
23	GORONTALO	700	64	59	58	65	59	55	54	53	55	56	62	62
24	SULAWESI TENGAH	10,720	976	900	890	997	900	836	825	804	836	858	943	954
25	SULAWESI TENGGARA	4,200	382	353	349	391	353	328	323	315	328	336	370	374
26	SULAWESI SELATAN	60,000	5,460	5,040	4,980	5,580	5,040	4,680	4,620	4,500	4,680	4,800	5,280	5,340
27	SULAWESI BARAT	150	14	13	12	14	13	12	12	11	12	12	13	13
28	NUSA TENGGARA BARAT	7,500	683	630	623	698	630	585	578	563	585	600	660	668
29	NUSA TENGGARA TIMUR	10,000	910	840	830	930	840	780	770	750	780	800	880	890
30	MALUKU	1,900	173	160	158	177	160	148	146	143	148	152	167	169
31	PAPUA	120	11	10	10	11	10	9	9	9	9	10	11	11
32	MALUKU UTARA	600	55	50	50	56	50	47	46	45	47	48	53	53
33	PAPUA BARAT	210	19	18	17	20	18	16	16	16	16	17	18	19
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>1,000,000</b>	<b>91,000</b>	<b>84,000</b>	<b>83,000</b>	<b>93,000</b>	<b>84,000</b>	<b>78,000</b>	<b>77,000</b>	<b>75,000</b>	<b>78,000</b>	<b>80,000</b>	<b>88,000</b>	<b>89,000</b>

Lampiran 3.14. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Tanaman Pangan**

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	7,698	701	647	639	716	647	600	593	577	600	616	677	685
2	SUMATERA UTARA	36,565	3,327	3,071	3,035	3,401	3,071	2,852	2,815	2,742	2,852	2,925	3,218	3,254
3	SUMATERA BARAT	10,264	934	862	852	955	862	801	790	770	801	821	903	913
4	J A M B I	4,298	391	361	357	400	361	335	331	322	335	344	378	383
5	R I A U	5,004	455	420	415	465	420	390	385	375	390	400	440	445
6	BENGGULU	2,823	257	237	234	262	237	220	217	212	220	226	248	251
7	SUMATERA SELATAN	6,415	584	539	532	597	539	500	494	481	500	513	565	571
8	BANGKA BELITUNG	1,283	117	108	106	119	108	100	99	96	100	103	113	114
9	LAMPUNG	14,947	1,360	1,256	1,241	1,390	1,256	1,166	1,151	1,121	1,166	1,196	1,315	1,330
10	KEP. RIAU	32	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3
11	DKI. JAKARTA	32	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3
12	BANTEN	962	88	81	80	89	81	75	74	72	75	77	85	86
13	JAWA BARAT	46,187	4,203	3,880	3,834	4,295	3,880	3,603	3,556	3,464	3,603	3,695	4,064	4,111
14	D.I. YOGYAKARTA	6,415	584	539	532	597	539	500	494	481	500	513	565	571
15	JAWA TENGAH	128,297	11,675	10,777	10,649	11,932	10,777	10,007	9,879	9,622	10,007	10,264	11,290	11,418
16	JAWA TIMUR	297,649	27,086	25,003	24,705	27,681	25,003	23,217	22,919	22,324	23,217	23,812	26,193	26,491
17	B A L I	4,170	379	350	346	388	350	325	321	313	325	334	367	371
18	KALIMANTAN BARAT	2,245	204	189	186	209	189	175	173	168	175	180	198	200
19	KALIMANTAN TENGAH	962	88	81	80	89	81	75	74	72	75	77	85	86
20	KALIMANTAN SELATAN	1,411	128	119	117	131	119	110	109	106	110	113	124	126
21	KALIMANTAN TIMUR	1,732	158	145	144	161	145	135	133	130	135	139	152	154
22	SULAWESI UTARA	449	41	38	37	42	38	35	35	34	35	36	40	40
23	GORONTALO	449	41	38	37	42	38	35	35	34	35	36	40	40
24	SULAWESI TENGAH	6,877	626	578	571	640	578	536	530	516	536	550	605	612
25	SULAWESI TENGGARA	2,694	245	226	224	251	226	210	207	202	210	216	237	240
26	SULAWESI SELATAN	38,489	3,503	3,233	3,195	3,579	3,233	3,002	2,964	2,887	3,002	3,079	3,387	3,426
27	SULAWESI BARAT	96	9	8	8	9	8	8	7	7	8	8	8	9
28	NUSA TENGGARA BARAT	4,811	438	404	399	447	404	375	370	361	375	385	423	428
29	NUSA TENGGARA TIMUR	6,415	584	539	532	597	539	500	494	481	500	513	565	571
30	MALUKU	1,219	111	102	101	113	102	95	94	91	95	98	107	108
31	PAPUA	77	7	6	6	7	6	6	6	6	6	6	7	7
32	MALUKU UTARA	385	35	32	32	36	32	30	30	29	30	31	34	34
33	PAPUA BARAT	135	12	11	11	13	11	11	10	10	11	11	12	12
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>641,486</b>	<b>58,375</b>	<b>53,885</b>	<b>53,243</b>	<b>59,658</b>	<b>53,885</b>	<b>50,036</b>	<b>49,394</b>	<b>48,111</b>	<b>50,036</b>	<b>51,319</b>	<b>56,451</b>	<b>57,092</b>

Lampiran 3.15. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Hortikultura**

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	589	54	49	49	55	49	46	45	44	46	47	52	52
2	SUMATERA UTARA	2,796	254	235	232	260	235	218	215	210	218	224	246	249
3	SUMATERA BARAT	785	71	66	65	73	66	61	60	59	61	63	69	70
4	J A M B I	329	30	28	27	31	28	26	25	25	26	26	29	29
5	R I A U	383	35	32	32	36	32	30	29	29	30	31	34	34
6	BENGGKULU	216	20	18	18	20	18	17	17	16	17	17	19	19
7	SUMATERA SELATAN	491	45	41	41	46	41	38	38	37	38	39	43	44
8	BANGKA BELITUNG	98	9	8	8	9	8	8	8	7	8	8	9	9
9	LAMPUNG	1,143	104	96	95	106	96	89	88	86	89	91	101	102
10	KEP. RIAU	2,45	0,22	0,21	0,20	0,23	0,21	0,19	0,19	0,18	0,19	0,20	0,22	0,22
11	DKI. JAKARTA	2,45	0,22	0,21	0,20	0,23	0,21	0,19	0,19	0,18	0,19	0,20	0,22	0,22
12	BANTEN	74	7	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	7
13	JAWA BARAT	3,532	321	297	293	328	297	275	272	265	275	283	311	314
14	D.I. YOGYAKARTA	491	45	41	41	46	41	38	38	37	38	39	43	44
15	JAWA TENGAH	9,810	893	824	814	912	824	765	755	736	765	785	863	873
16	JAWA TIMUR	22,759	2,071	1,912	1,889	2,117	1,912	1,775	1,752	1,707	1,775	1,821	2,003	2,026
17	B A L I	319	29	27	26	30	27	25	25	24	25	26	28	28
18	KALIMANTAN BARAT	172	16	14	14	16	14	13	13	13	13	14	15	15
19	KALIMANTAN TENGAH	74	7	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	7
20	KALIMANTAN SELATAN	108	10	9	9	10	9	8	8	8	8	9	9	10
21	KALIMANTAN TIMUR	132	12	11	11	12	11	10	10	10	10	11	12	12
22	SULAWESI UTARA	34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23	GORONTALO	34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24	SULAWESI TENGAH	526	48	44	44	49	44	41	40	39	41	42	46	47
25	SULAWESI TENGGARA	206	19	17	17	19	17	16	16	15	16	16	18	18
26	SULAWESI SELATAN	2,943	268	247	244	274	247	230	227	221	230	235	259	262
27	SULAWESI BARAT	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	NUSA TENGGARA BARAT	368	33	31	31	34	31	29	28	28	29	29	32	33
29	NUSA TENGGARA TIMUR	491	45	41	41	46	41	38	38	37	38	39	43	44
30	MALUKU	93	8	8	8	9	8	7	7	7	7	7	8	8
31	PAPUA	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
32	MALUKU UTARA	29	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3
33	PAPUA BARAT	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>49,050</b>	<b>4,464</b>	<b>4,120</b>	<b>4,071</b>	<b>4,562</b>	<b>4,120</b>	<b>3,826</b>	<b>3,777</b>	<b>3,679</b>	<b>3,826</b>	<b>3,924</b>	<b>4,316</b>	<b>4,365</b>

Lampiran 3.16. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Perkebunan**

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	3,360	306	282	279	312	282	262	259	252	262	269	296	299
2	SUMATERA UTARA	15,961	1,452	1,341	1,325	1,484	1,341	1,245	1,229	1,197	1,245	1,277	1,405	1,420
3	SUMATERA BARAT	4,480	408	376	372	417	376	349	345	336	349	358	394	399
4	J A M B I	1,876	171	158	156	174	158	146	144	141	146	150	165	167
5	R I A U	2,184	199	183	181	203	183	170	168	164	170	175	192	194
6	BENGGULU	1,232	112	103	102	115	103	96	95	92	96	99	108	110
7	SUMATERA SELATAN	2,800	255	235	232	260	235	218	216	210	218	224	246	249
8	BANGKA BELITUNG	560	51	47	46	52	47	44	43	42	44	45	49	50
9	LAMPUNG	6,524	594	548	542	607	548	509	502	489	509	522	574	581
10	KEP. RIAU	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	DKI. JAKARTA	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	BANTEN	420	38	35	35	39	35	33	32	32	33	34	37	37
13	JAWA BARAT	20,161	1,835	1,694	1,673	1,875	1,694	1,573	1,552	1,512	1,573	1,613	1,774	1,794
14	D.I. YOGYAKARTA	2,800	255	235	232	260	235	218	216	210	218	224	246	249
15	JAWA TENGAH	56,002	5,096	4,704	4,648	5,208	4,704	4,368	4,312	4,200	4,368	4,480	4,928	4,984
16	JAWA TIMUR	129,925	11,823	10,914	10,784	12,083	10,914	10,134	10,004	9,744	10,134	10,394	11,433	11,563
17	B A L I	1,820	166	153	151	169	153	142	140	137	142	146	160	162
18	KALIMANTAN BARAT	980	89	82	81	91	82	76	75	74	76	78	86	87
19	KALIMANTAN TENGAH	420	38	35	35	39	35	33	32	32	33	34	37	37
20	KALIMANTAN SELATAN	616	56	52	51	57	52	48	47	46	48	49	54	55
21	KALIMANTAN TIMUR	756	69	64	63	70	64	59	58	57	59	60	67	67
22	SULAWESI UTARA	196	18	16	16	18	16	15	15	15	15	16	17	17
23	GORONTALO	196	18	16	16	18	16	15	15	15	15	16	17	17
24	SULAWESI TENGAH	3,002	273	252	249	279	252	234	231	225	234	240	264	267
25	SULAWESI TENGGARA	1,176	107	99	98	109	99	92	91	88	92	94	103	105
26	SULAWESI SELATAN	16,801	1,529	1,411	1,394	1,562	1,411	1,310	1,294	1,260	1,310	1,344	1,478	1,495
27	SULAWESI BARAT	42	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4
28	NUSA TENGGARA BARAT	2,100	191	176	174	195	176	164	162	158	164	168	185	187
29	NUSA TENGGARA TIMUR	2,800	255	235	232	260	235	218	216	210	218	224	246	249
30	MALUKU	532	48	45	44	49	45	41	41	40	41	43	47	47
31	PAPUA	34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	MALUKU UTARA	168	15	14	14	16	14	13	13	13	13	13	15	15
33	PAPUA BARAT	59	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>280,010</b>	<b>25,481</b>	<b>23,521</b>	<b>23,241</b>	<b>26,041</b>	<b>23,521</b>	<b>21,841</b>	<b>21,561</b>	<b>21,001</b>	<b>21,841</b>	<b>22,401</b>	<b>24,641</b>	<b>24,921</b>

Lampiran 3.17. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Peternakan**

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	299	27	25	25	28	25	23	23	22	23	24	26	27
2	SUMATERA UTARA	1,418	129	119	118	132	119	111	109	106	111	113	125	126
3	SUMATERA BARAT	398	36	33	33	37	33	31	31	30	31	32	35	35
4	J A M B I	167	15	14	14	16	14	13	13	13	13	13	15	15
5	R I A U	194	18	16	16	18	16	15	15	15	15	16	17	17
6	BENGGKULU	109	10	9	9	10	9	9	8	8	9	9	10	10
7	SUMATERA SELATAN	249	23	21	21	23	21	19	19	19	19	20	22	22
8	BANGKA BELITUNG	50	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
9	LAMPUNG	580	53	49	48	54	49	45	45	43	45	46	51	52
10	KEP. RIAU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI. JAKARTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BANTEN	37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	JAWA BARAT	1,792	163	150	149	167	150	140	138	134	140	143	158	159
14	D.I. YOGYAKARTA	249	23	21	21	23	21	19	19	19	19	20	22	22
15	JAWA TENGAH	4,977	453	418	413	463	418	388	383	373	388	398	438	443
16	JAWA TIMUR	11,546	1,051	970	958	1,074	970	901	889	866	901	924	1,016	1,028
17	B A L I	162	15	14	13	15	14	13	12	12	13	13	14	14
18	KALIMANTAN BARAT	87	8	7	7	8	7	7	7	7	7	7	8	8
19	KALIMANTAN TENGAH	37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
20	KALIMANTAN SELATAN	55	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5
21	KALIMANTAN TIMUR	67	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	6	6
22	SULAWESI UTARA	17	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2
23	GORONTALO	17	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2
24	SULAWESI TENGAH	267	24	22	22	25	22	21	21	20	21	21	23	24
25	SULAWESI TENGGARA	105	10	9	9	10	9	8	8	8	8	8	9	9
26	SULAWESI SELATAN	1,493	136	125	124	139	125	116	115	112	116	119	131	133
27	SULAWESI BARAT	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	NUSA TENGGARA BARAT	187	17	16	15	17	16	15	14	14	15	15	16	17
29	NUSA TENGGARA TIMUR	249	23	21	21	23	21	19	19	19	19	20	22	22
30	MALUKU	47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	PAPUA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MALUKU UTARA	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	PAPUA BARAT	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>24,883</b>	<b>2,264</b>	<b>2,090</b>	<b>2,065</b>	<b>2,314</b>	<b>2,090</b>	<b>1,941</b>	<b>1,916</b>	<b>1,866</b>	<b>1,941</b>	<b>1,991</b>	<b>2,190</b>	<b>2,215</b>

Lampiran 3.18. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Perikanan Budidaya**

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	55	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5
2	SUMATERA UTARA	261	24	22	22	24	22	20	20	20	20	21	23	23
3	SUMATERA BARAT	73	7	6	6	7	6	6	6	5	6	6	6	7
4	J A M B I	31	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3
5	R I A U	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	BENGGKULU	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	SUMATERA SELATAN	46	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
8	BANGKA BELITUNG	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	LAMPUNG	107	10	9	9	10	9	8	8	8	8	9	9	9
10	KEP. RIAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI. JAKARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BANTEN	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	JAWA BARAT	329	30	28	27	31	28	26	25	25	26	26	29	29
14	D.I. YOGYAKARTA	46	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
15	JAWA TENGAH	914	83	77	76	85	77	71	70	69	71	73	80	81
16	JAWA TIMUR	2,121	193	178	176	197	178	165	163	159	165	170	187	189
17	B A L I	30	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3
18	KALIMANTAN BARAT	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	KALIMANTAN TENGAH	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	KALIMANTAN SELATAN	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	KALIMANTAN TIMUR	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	SULAWESI UTARA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	GORONTALO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	SULAWESI TENGAH	49	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
25	SULAWESI TENGGARA	19	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2
26	SULAWESI SELATAN	274	25	23	23	26	23	21	21	21	21	22	24	24
27	SULAWESI BARAT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	NUSA TENGGARA BARAT	34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
29	NUSA TENGGARA TIMUR	46	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
30	MALUKU	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	PAPUA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MALUKU UTARA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	PAPUA BARAT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>4,571</b>	<b>416</b>	<b>384</b>	<b>379</b>	<b>425</b>	<b>384</b>	<b>357</b>	<b>352</b>	<b>343</b>	<b>357</b>	<b>366</b>	<b>402</b>	<b>407</b>



Lampiran 3.19. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

														(Ton)
NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	44,000	4,004	3,696	3,652	4,092	3,696	3,432	3,388	3,300	3,432	3,520	3,872	3,916
2	SUMATERA UTARA	125,000	11,375	10,500	10,375	11,625	10,500	9,750	9,625	9,375	9,750	10,000	11,000	11,125
3	SUMATERA BARAT	52,000	4,732	4,368	4,316	4,836	4,368	4,056	4,004	3,900	4,056	4,160	4,576	4,628
4	J A M B I	42,000	3,822	3,528	3,486	3,906	3,528	3,276	3,234	3,150	3,276	3,360	3,696	3,738
5	R I A U	42,000	3,822	3,528	3,486	3,906	3,528	3,276	3,234	3,150	3,276	3,360	3,696	3,738
6	BENGGKULU	32,000	2,912	2,688	2,656	2,976	2,688	2,496	2,464	2,400	2,496	2,560	2,816	2,848
7	SUMATERA SELATAN	175,000	15,925	14,700	14,525	16,275	14,700	13,650	13,475	13,125	13,650	14,000	15,400	15,575
8	BANGKA BELITUNG	20,000	1,820	1,680	1,660	1,860	1,680	1,560	1,540	1,500	1,560	1,600	1,760	1,780
9	LAMPUNG	152,000	13,832	12,768	12,616	14,136	12,768	11,856	11,704	11,400	11,856	12,160	13,376	13,528
10	KEP. RIAU	500	46	42	42	47	42	39	39	38	39	40	44	45
11	DKI. JAKARTA	500	46	42	42	47	42	39	39	38	39	40	44	45
12	BANTEN	26,000	2,366	2,184	2,158	2,418	2,184	2,028	2,002	1,950	2,028	2,080	2,288	2,314
13	JAWA BARAT	350,000	31,850	29,400	29,050	32,550	29,400	27,300	26,950	26,250	27,300	28,000	30,800	31,150
14	D.I. YOGYAKARTA	32,000	2,912	2,688	2,656	2,976	2,688	2,496	2,464	2,400	2,496	2,560	2,816	2,848
15	JAWA TENGAH	400,000	36,400	33,600	33,200	37,200	33,600	31,200	30,800	30,000	31,200	32,000	35,200	35,600
16	JAWA TIMUR	580,000	52,780	48,720	48,140	53,940	48,720	45,240	44,660	43,500	45,240	46,400	51,040	51,620
17	B A L I	27,000	2,457	2,268	2,241	2,511	2,268	2,106	2,079	2,025	2,106	2,160	2,376	2,403
18	KALIMANTAN BARAT	23,000	2,093	1,932	1,909	2,139	1,932	1,794	1,771	1,725	1,794	1,840	2,024	2,047
19	KALIMANTAN TENGAH	25,000	2,275	2,100	2,075	2,325	2,100	1,950	1,925	1,875	1,950	2,000	2,200	2,225
20	KALIMANTAN SELATAN	24,000	2,184	2,016	1,992	2,232	2,016	1,872	1,848	1,800	1,872	1,920	2,112	2,136
21	KALIMANTAN TIMUR	21,000	1,911	1,764	1,743	1,953	1,764	1,638	1,617	1,575	1,638	1,680	1,848	1,869
22	SULAWESI UTARA	12,000	1,092	1,008	996	1,116	1,008	936	924	900	936	960	1,056	1,068
23	GORONTALO	13,000	1,183	1,092	1,079	1,209	1,092	1,014	1,001	975	1,014	1,040	1,144	1,157
24	SULAWESI TENGAH	22,000	2,002	1,848	1,826	2,046	1,848	1,716	1,694	1,650	1,716	1,760	1,936	1,958
25	SULAWESI TENGGARA	15,000	1,365	1,260	1,245	1,395	1,260	1,170	1,155	1,125	1,170	1,200	1,320	1,335
26	SULAWESI SELATAN	80,000	7,280	6,720	6,640	7,440	6,720	6,240	6,160	6,000	6,240	6,400	7,040	7,120
27	SULAWESI BARAT	13,000	1,183	1,092	1,079	1,209	1,092	1,014	1,001	975	1,014	1,040	1,144	1,157
28	NUSA TENGGARA BARAT	30,000	2,730	2,520	2,490	2,790	2,520	2,340	2,310	2,250	2,340	2,400	2,640	2,670
29	NUSA TENGGARA TIMUR	11,000	1,001	924	913	1,023	924	858	847	825	858	880	968	979
30	MALUKU	1,800	164	151	149	167	151	140	139	135	140	144	158	160
31	PAPUA	6,000	546	504	498	558	504	468	462	450	468	480	528	534
32	MALUKU UTARA	1,700	155	143	141	158	143	133	131	128	133	136	150	151
33	PAPUA BARAT	1,500	137	126	125	140	126	117	116	113	117	120	132	134
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>2,400,000</b>	<b>218,400</b>	<b>201,600</b>	<b>199,200</b>	<b>223,200</b>	<b>201,600</b>	<b>187,200</b>	<b>184,800</b>	<b>180,000</b>	<b>187,200</b>	<b>192,000</b>	<b>211,200</b>	<b>213,600</b>

Lampiran 3.20. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Tanaman Pangan**

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	29,852	2,717	2,508	2,478	2,776	2,508	2,328	2,299	2,239	2,328	2,388	2,627	2,657
2	SUMATERA UTARA	84,807	7,717	7,124	7,039	7,887	7,124	6,615	6,530	6,361	6,615	6,785	7,463	7,548
3	SUMATERA BARAT	35,280	3,210	2,963	2,928	3,281	2,963	2,752	2,717	2,646	2,752	2,822	3,105	3,140
4	J A M B I	28,495	2,593	2,394	2,365	2,650	2,394	2,223	2,194	2,137	2,223	2,280	2,508	2,536
5	R I A U	28,495	2,593	2,394	2,365	2,650	2,394	2,223	2,194	2,137	2,223	2,280	2,508	2,536
6	BENGGKULU	21,711	1,976	1,824	1,802	2,019	1,824	1,693	1,672	1,628	1,693	1,737	1,911	1,932
7	SUMATERA SELATAN	118,730	10,804	9,973	9,855	11,042	9,973	9,261	9,142	8,905	9,261	9,498	10,448	10,567
8	BANGKA BELITUNG	13,569	1,235	1,140	1,126	1,262	1,140	1,058	1,045	1,018	1,058	1,086	1,194	1,208
9	LAMPUNG	103,125	9,384	8,663	8,559	9,591	8,663	8,044	7,941	7,734	8,044	8,250	9,075	9,178
10	KEP. RIAU	339	31	28	28	32	28	26	26	25	26	27	30	30
11	DKI. JAKARTA	339	31	28	28	32	28	26	26	25	26	27	30	30
12	BANTEN	17,640	1,605	1,482	1,464	1,641	1,482	1,376	1,358	1,323	1,376	1,411	1,552	1,570
13	JAWA BARAT	237,460	21,609	19,947	19,709	22,084	19,947	18,522	18,284	17,809	18,522	18,997	20,896	21,134
14	D.I. YOGYAKARTA	21,711	1,976	1,824	1,802	2,019	1,824	1,693	1,672	1,628	1,693	1,737	1,911	1,932
15	JAWA TENGAH	271,382	24,696	22,796	22,525	25,239	22,796	21,168	20,896	20,354	21,168	21,711	23,882	24,153
16	JAWA TIMUR	393,504	35,809	33,054	32,661	36,596	33,054	30,693	30,300	29,513	30,693	31,480	34,628	35,022
17	B A L I	18,318	1,667	1,539	1,520	1,704	1,539	1,429	1,411	1,374	1,429	1,465	1,612	1,630
18	KALIMANTAN BARAT	15,604	1,420	1,311	1,295	1,451	1,311	1,217	1,202	1,170	1,217	1,248	1,373	1,389
19	KALIMANTAN TENGAH	16,961	1,543	1,425	1,408	1,577	1,425	1,323	1,306	1,272	1,323	1,357	1,493	1,510
20	KALIMANTAN SELATAN	16,283	1,482	1,368	1,351	1,514	1,368	1,270	1,254	1,221	1,270	1,303	1,433	1,449
21	KALIMANTAN TIMUR	14,248	1,297	1,197	1,183	1,325	1,197	1,111	1,097	1,069	1,111	1,140	1,254	1,268
22	SULAWESI UTARA	8,141	741	684	676	757	684	635	627	611	635	651	716	725
23	GORONTALO	8,820	803	741	732	820	741	688	679	661	688	706	776	785
24	SULAWESI TENGAH	14,926	1,358	1,254	1,239	1,388	1,254	1,164	1,149	1,119	1,164	1,194	1,313	1,328
25	SULAWESI TENGGARA	10,177	926	855	845	946	855	794	784	763	794	814	896	906
26	SULAWESI SELATAN	54,276	4,939	4,559	4,505	5,048	4,559	4,234	4,179	4,071	4,234	4,342	4,776	4,831
27	SULAWESI BARAT	8,820	803	741	732	820	741	688	679	661	688	706	776	785
28	NUSA TENGGARA BARAT	20,354	1,852	1,710	1,689	1,893	1,710	1,588	1,567	1,527	1,588	1,628	1,791	1,811
29	NUSA TENGGARA TIMUR	7,463	679	627	619	694	627	582	575	560	582	597	657	664
30	MALUKU	1,221	111	103	101	114	103	95	94	92	95	98	107	109
31	PAPUA	4,071	370	342	338	379	342	318	313	305	318	326	358	362
32	MALUKU UTARA	1,153	105	97	96	107	97	90	89	87	90	92	101	103
33	PAPUA BARAT	1,018	93	85	84	95	85	79	78	76	79	81	90	91
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>1,628,294</b>	<b>148,175</b>	<b>136,777</b>	<b>135,148</b>	<b>151,431</b>	<b>136,777</b>	<b>127,007</b>	<b>125,379</b>	<b>122,122</b>	<b>127,007</b>	<b>130,264</b>	<b>143,290</b>	<b>144,918</b>

Lampiran 3.21. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Hortikultura**

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	4,416	402	371	367	411	371	344	340	331	344	353	389	393
2	SUMATERA UTARA	12,545	1,142	1,054	1,041	1,167	1,054	978	966	941	978	1,004	1,104	1,116
3	SUMATERA BARAT	5,219	475	438	433	485	438	407	402	391	407	417	459	464
4	J A M B I	4,215	384	354	350	392	354	329	325	316	329	337	371	375
5	R I A U	4,215	384	354	350	392	354	329	325	316	329	337	371	375
6	BENGGKULU	3,211	292	270	267	299	270	250	247	241	250	257	283	286
7	SUMATERA SELATAN	17,563	1,598	1,475	1,458	1,633	1,475	1,370	1,352	1,317	1,370	1,405	1,546	1,563
8	BANGKA BELITUNG	2,007	183	169	167	187	169	157	155	151	157	161	177	179
9	LAMPUNG	15,254	1,388	1,281	1,266	1,419	1,281	1,190	1,175	1,144	1,190	1,220	1,342	1,358
10	KEP. RIAU	50	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
11	DKI. JAKARTA	50	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
12	BANTEN	2,609	237	219	217	243	219	204	201	196	204	209	230	232
13	JAWA BARAT	35,125	3,196	2,951	2,915	3,267	2,951	2,740	2,705	2,634	2,740	2,810	3,091	3,126
14	D.I. YOGYAKARTA	3,211	292	270	267	299	270	250	247	241	250	257	283	286
15	JAWA TENGAH	40,143	3,653	3,372	3,332	3,733	3,372	3,131	3,091	3,011	3,131	3,211	3,533	3,573
16	JAWA TIMUR	58,208	5,297	4,889	4,831	5,413	4,889	4,540	4,482	4,366	4,540	4,657	5,122	5,180
17	B A L I	2,710	247	228	225	252	228	211	209	203	211	217	238	241
18	KALIMANTAN BARAT	2,308	210	194	192	215	194	180	178	173	180	185	203	205
19	KALIMANTAN TENGAH	2,509	228	211	208	233	211	196	193	188	196	201	221	223
20	KALIMANTAN SELATAN	2,409	219	202	200	224	202	188	185	181	188	193	212	214
21	KALIMANTAN TIMUR	2,108	192	177	175	196	177	164	162	158	164	169	185	188
22	SULAWESI UTARA	1,204	110	101	100	112	101	94	93	90	94	96	106	107
23	GORONTALO	1,305	119	110	108	121	110	102	100	98	102	104	115	116
24	SULAWESI TENGAH	2,208	201	185	183	205	185	172	170	166	172	177	194	197
25	SULAWESI TENGGARA	1,505	137	126	125	140	126	117	116	113	117	120	132	134
26	SULAWESI SELATAN	8,029	731	674	666	747	674	626	618	602	626	642	707	715
27	SULAWESI BARAT	1,305	119	110	108	121	110	102	100	98	102	104	115	116
28	NUSA TENGGARA BARAT	3,011	274	253	250	280	253	235	232	226	235	241	265	268
29	NUSA TENGGARA TIMUR	1,104	100	93	92	103	93	86	85	83	86	88	97	98
30	MALUKU	181	16	15	15	17	15	14	14	14	14	14	16	16
31	PAPUA	602	55	51	50	56	51	47	46	45	47	48	53	54
32	MALUKU UTARA	171	16	14	14	16	14	13	13	13	13	14	15	15
33	PAPUA BARAT	151	14	13	12	14	13	12	12	11	12	12	13	13
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>240,859</b>	<b>21,918</b>	<b>20,232</b>	<b>19,991</b>	<b>22,400</b>	<b>20,232</b>	<b>18,787</b>	<b>18,546</b>	<b>18,064</b>	<b>18,787</b>	<b>19,269</b>	<b>21,196</b>	<b>21,436</b>

Lampiran 3.22. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Perkebunan**

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	8,446	769	709	701	786	709	659	650	633	659	676	743	752
2	SUMATERA UTARA	23,995	2,184	2,016	1,992	2,232	2,016	1,872	1,848	1,800	1,872	1,920	2,112	2,136
3	SUMATERA BARAT	9,982	908	838	829	928	838	779	769	749	779	799	878	888
4	J A M B I	8,062	734	677	669	750	677	629	621	605	629	645	709	718
5	R I A U	8,062	734	677	669	750	677	629	621	605	629	645	709	718
6	BENGGKULU	6,143	559	516	510	571	516	479	473	461	479	491	541	547
7	SUMATERA SELATAN	33,594	3,057	2,822	2,788	3,124	2,822	2,620	2,587	2,520	2,620	2,687	2,956	2,990
8	BANGKA BELITUNG	3,839	349	322	319	357	322	299	296	288	299	307	338	342
9	LAMPUNG	29,178	2,655	2,451	2,422	2,714	2,451	2,276	2,247	2,188	2,276	2,334	2,568	2,597
10	KEP. RIAU	96	9	8	8	9	8	7	7	7	7	8	8	9
11	DKI. JAKARTA	96	9	8	8	9	8	7	7	7	7	8	8	9
12	BANTEN	4,991	454	419	414	464	419	389	384	374	389	399	439	444
13	JAWA BARAT	67,187	6,114	5,644	5,577	6,248	5,644	5,241	5,173	5,039	5,241	5,375	5,912	5,980
14	D.I. YOGYAKARTA	6,143	559	516	510	571	516	479	473	461	479	491	541	547
15	JAWA TENGAH	76,785	6,987	6,450	6,373	7,141	6,450	5,989	5,912	5,759	5,989	6,143	6,757	6,834
16	JAWA TIMUR	111,339	10,132	9,352	9,241	10,355	9,352	8,684	8,573	8,350	8,684	8,907	9,798	9,909
17	B A L I	5,183	472	435	430	482	435	404	399	389	404	415	456	461
18	KALIMANTAN BARAT	4,415	402	371	366	411	371	344	340	331	344	353	389	393
19	KALIMANTAN TENGAH	4,799	437	403	398	446	403	374	370	360	374	384	422	427
20	KALIMANTAN SELATAN	4,607	419	387	382	428	387	359	355	346	359	369	405	410
21	KALIMANTAN TIMUR	4,031	367	339	335	375	339	314	310	302	314	322	355	359
22	SULAWESI UTARA	2,304	210	193	191	214	193	180	177	173	180	184	203	205
23	GORONTALO	2,496	227	210	207	232	210	195	192	187	195	200	220	222
24	SULAWESI TENGAH	4,223	384	355	351	393	355	329	325	317	329	338	372	376
25	SULAWESI TENGGARA	2,879	262	242	239	268	242	225	222	216	225	230	253	256
26	SULAWESI SELATAN	15,357	1,397	1,290	1,275	1,428	1,290	1,198	1,182	1,152	1,198	1,229	1,351	1,367
27	SULAWESI BARAT	2,496	227	210	207	232	210	195	192	187	195	200	220	222
28	NUSA TENGGARA BARAT	5,759	524	484	478	536	484	449	443	432	449	461	507	513
29	NUSA TENGGARA TIMUR	2,112	192	177	175	196	177	165	163	158	165	169	186	188
30	MALUKU	346	31	29	29	32	29	27	27	26	27	28	30	31
31	PAPUA	1,152	105	97	96	107	97	90	89	86	90	92	101	103
32	MALUKU UTARA	326	30	27	27	30	27	25	25	24	25	26	29	29
33	PAPUA BARAT	288	26	24	24	27	24	22	22	22	22	23	25	26
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>460,712</b>	<b>41,925</b>	<b>38,700</b>	<b>38,239</b>	<b>42,846</b>	<b>38,700</b>	<b>35,936</b>	<b>35,475</b>	<b>34,553</b>	<b>35,936</b>	<b>36,857</b>	<b>40,543</b>	<b>41,003</b>

Lampiran 3.23. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Peternakan**

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	814	74	68	68	76	68	63	63	61	63	65	72	72
2	SUMATERA UTARA	2,313	210	194	192	215	194	180	178	173	180	185	204	206
3	SUMATERA BARAT	962	88	81	80	89	81	75	74	72	75	77	85	86
4	J A M B I	777	71	65	64	72	65	61	60	58	61	62	68	69
5	R I A U	777	71	65	64	72	65	61	60	58	61	62	68	69
6	BENGGKULU	592	54	50	49	55	50	46	46	44	46	47	52	53
7	SUMATERA SELATAN	3,238	295	272	269	301	272	253	249	243	253	259	285	288
8	BANGKA BELITUNG	370	34	31	31	34	31	29	28	28	29	30	33	33
9	LAMPUNG	2,812	256	236	233	262	236	219	217	211	219	225	247	250
10	KEP. RIAU	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	DKI. JAKARTA	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	BANTEN	481	44	40	40	45	40	38	37	36	38	38	42	43
13	JAWA BARAT	6,475	589	544	537	602	544	505	499	486	505	518	570	576
14	D.I. YOGYAKARTA	592	54	50	49	55	50	46	46	44	46	47	52	53
15	JAWA TENGAH	7,400	673	622	614	688	622	577	570	555	577	592	651	659
16	JAWA TIMUR	10,731	976	901	891	998	901	837	826	805	837	858	944	955
17	B A L I	500	45	42	41	46	42	39	38	37	39	40	44	44
18	KALIMANTAN BARAT	426	39	36	35	40	36	33	33	32	33	34	37	38
19	KALIMANTAN TENGAH	463	42	39	38	43	39	36	36	35	36	37	41	41
20	KALIMANTAN SELATAN	444	40	37	37	41	37	35	34	33	35	36	39	40
21	KALIMANTAN TIMUR	389	35	33	32	36	33	30	30	29	30	31	34	35
22	SULAWESI UTARA	222	20	19	18	21	19	17	17	17	17	18	20	20
23	GORONTALO	241	22	20	20	22	20	19	19	18	19	19	21	21
24	SULAWESI TENGAH	407	37	34	34	38	34	32	31	31	32	33	36	36
25	SULAWESI TENGGARA	278	25	23	23	26	23	22	21	21	22	22	24	25
26	SULAWESI SELATAN	1,480	135	124	123	138	124	115	114	111	115	118	130	132
27	SULAWESI BARAT	241	22	20	20	22	20	19	19	18	19	19	21	21
28	NUSA TENGGARA BARAT	555	51	47	46	52	47	43	43	42	43	44	49	49
29	NUSA TENGGARA TIMUR	204	19	17	17	19	17	16	16	15	16	16	18	18
30	MALUKU	33	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
31	PAPUA	111	10	9	9	10	9	9	9	8	9	9	10	10
32	MALUKU UTARA	31	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3
33	PAPUA BARAT	28	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>44,402</b>	<b>4,041</b>	<b>3,730</b>	<b>3,685</b>	<b>4,129</b>	<b>3,730</b>	<b>3,463</b>	<b>3,419</b>	<b>3,330</b>	<b>3,463</b>	<b>3,552</b>	<b>3,907</b>	<b>3,952</b>

Lampiran 3.24. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Subsektor : Perikanan Budidaya**

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	472	43	40	39	44	40	37	36	35	37	38	42	42
2	SUMATERA UTARA	1,340	122	113	111	125	113	105	103	101	105	107	118	119
3	SUMATERA BARAT	558	51	47	46	52	47	43	43	42	43	45	49	50
4	J A M B I	450	41	38	37	42	38	35	35	34	35	36	40	40
5	R I A U	450	41	38	37	42	38	35	35	34	35	36	40	40
6	BENGGKULU	343	31	29	28	32	29	27	26	26	27	27	30	31
7	SUMATERA SELATAN	1,876	171	158	156	174	158	146	144	141	146	150	165	167
8	BANGKA BELITUNG	214	20	18	18	20	18	17	17	16	17	17	19	19
9	LAMPUNG	1,630	148	137	135	152	137	127	125	122	127	130	143	145
10	KEP. RIAU	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI. JAKARTA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BANTEN	279	25	23	23	26	23	22	21	21	22	22	25	25
13	JAWA BARAT	3,753	341	315	311	349	315	293	289	281	293	300	330	334
14	D.I. YOGYAKARTA	343	31	29	28	32	29	27	26	26	27	27	30	31
15	JAWA TENGAH	4,289	390	360	356	399	360	335	330	322	335	343	377	382
16	JAWA TIMUR	6,219	566	522	516	578	522	485	479	466	485	497	547	553
17	B A L I	289	26	24	24	27	24	23	22	22	23	23	25	26
18	KALIMANTAN BARAT	247	22	21	20	23	21	19	19	18	19	20	22	22
19	KALIMANTAN TENGAH	268	24	23	22	25	23	21	21	20	21	21	24	24
20	KALIMANTAN SELATAN	257	23	22	21	24	22	20	20	19	20	21	23	23
21	KALIMANTAN TIMUR	225	20	19	19	21	19	18	17	17	18	18	20	20
22	SULAWESI UTARA	129	12	11	11	12	11	10	10	10	10	10	11	11
23	GORONTALO	139	13	12	12	13	12	11	11	10	11	11	12	12
24	SULAWESI TENGAH	236	21	20	20	22	20	18	18	18	18	19	21	21
25	SULAWESI TENGGARA	161	15	14	13	15	14	13	12	12	13	13	14	14
26	SULAWESI SELATAN	858	78	72	71	80	72	67	66	64	67	69	75	76
27	SULAWESI BARAT	139	13	12	12	13	12	11	11	10	11	11	12	12
28	NUSA TENGGARA BARAT	322	29	27	27	30	27	25	25	24	25	26	28	29
29	NUSA TENGGARA TIMUR	118	11	10	10	11	10	9	9	9	9	9	10	10
30	MALUKU	19	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
31	PAPUA	64	6	5	5	6	5	5	5	5	5	5	6	6
32	MALUKU UTARA	18	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2
33	PAPUA BARAT	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>25,732</b>	<b>2,342</b>	<b>2,162</b>	<b>2,136</b>	<b>2,393</b>	<b>2,162</b>	<b>2,007</b>	<b>1,981</b>	<b>1,930</b>	<b>2,007</b>	<b>2,059</b>	<b>2,264</b>	<b>2,290</b>

Lampiran 3.25. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

														(Ton)
NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	12,240	1,114	1,028	1,016	1,138	1,028	955	942	918	955	979	1,077	1,089
2	SUMATERA UTARA	27,900	2,539	2,344	2,316	2,595	2,344	2,176	2,148	2,093	2,176	2,232	2,455	2,483
3	SUMATERA BARAT	16,380	1,491	1,376	1,360	1,523	1,376	1,278	1,261	1,229	1,278	1,310	1,441	1,458
4	J A M B I	16,650	1,515	1,399	1,382	1,548	1,399	1,299	1,282	1,249	1,299	1,332	1,465	1,482
5	R I A U	9,000	819	756	747	837	756	702	693	675	702	720	792	801
6	BENGKULU	9,000	819	756	747	837	756	702	693	675	702	720	792	801
7	SUMATERA SELATAN	27,000	2,457	2,268	2,241	2,511	2,268	2,106	2,079	2,025	2,106	2,160	2,376	2,403
8	BANGKA BELITUNG	5,400	491	454	448	502	454	421	416	405	421	432	475	481
9	LAMPUNG	36,000	3,276	3,024	2,988	3,348	3,024	2,808	2,772	2,700	2,808	2,880	3,168	3,204
10	KEP. RIAU	450	41	38	37	42	38	35	35	34	35	36	40	40
11	DKI. JAKARTA	450	41	38	37	42	38	35	35	34	35	36	40	40
12	BANTEN	9,900	901	832	822	921	832	772	762	743	772	792	871	881
13	JAWA BARAT	90,000	8,190	7,560	7,470	8,370	7,560	7,020	6,930	6,750	7,020	7,200	7,920	8,010
14	D.I. YOGYAKARTA	16,200	1,474	1,361	1,345	1,507	1,361	1,264	1,247	1,215	1,264	1,296	1,426	1,442
15	JAWA TENGAH	180,000	16,380	15,120	14,940	16,740	15,120	14,040	13,860	13,500	14,040	14,400	15,840	16,020
16	JAWA TIMUR	337,500	30,713	28,350	28,013	31,388	28,350	26,325	25,988	25,313	26,325	27,000	29,700	30,038
17	B A L I	19,440	1,769	1,633	1,614	1,808	1,633	1,516	1,497	1,458	1,516	1,555	1,711	1,730
18	KALIMANTAN BARAT	20,700	1,884	1,739	1,718	1,925	1,739	1,615	1,594	1,553	1,615	1,656	1,822	1,842
19	KALIMANTAN TENGAH	1,980	180	166	164	184	166	154	152	149	154	158	174	176
20	KALIMANTAN SELATAN	1,170	106	98	97	109	98	91	90	88	91	94	103	104
21	KALIMANTAN TIMUR	4,050	369	340	336	377	340	316	312	304	316	324	356	360
22	SULAWESI UTARA	2,160	197	181	179	201	181	168	166	162	168	173	190	192
23	GORONTALO	1,440	131	121	120	134	121	112	111	108	112	115	127	128
24	SULAWESI TENGAH	3,150	287	265	261	293	265	246	243	236	246	252	277	280
25	SULAWESI TENGGARA	5,850	532	491	486	544	491	456	450	439	456	468	515	521
26	SULAWESI SELATAN	21,150	1,925	1,777	1,755	1,967	1,777	1,650	1,629	1,586	1,650	1,692	1,861	1,882
27	SULAWESI BARAT	1,800	164	151	149	167	151	140	139	135	140	144	158	160
28	NUSA TENGGARA BARAT	11,700	1,065	983	971	1,088	983	913	901	878	913	936	1,030	1,041
29	NUSA TENGGARA TIMUR	4,500	410	378	374	419	378	351	347	338	351	360	396	401
30	MALUKU	360	33	30	30	33	30	28	28	27	28	29	32	32
31	PAPUA	5,490	500	461	456	511	461	428	423	412	428	439	483	489
32	MALUKU UTARA	720	66	60	60	67	60	56	55	54	56	58	63	64
33	PAPUA BARAT	270	25	23	22	25	23	21	21	20	21	22	24	24
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>900,000</b>	<b>81,900</b>	<b>75,600</b>	<b>74,700</b>	<b>83,700</b>	<b>75,600</b>	<b>70,200</b>	<b>69,300</b>	<b>67,500</b>	<b>70,200</b>	<b>72,000</b>	<b>79,200</b>	<b>80,100</b>

Lampiran 3.26. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Tanaman Pangan**

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	9,350	851	785	776	870	785	729	720	701	729	748	823	832
2	SUMATERA UTARA	21,313	1,939	1,790	1,769	1,982	1,790	1,662	1,641	1,598	1,662	1,705	1,876	1,897
3	SUMATERA BARAT	12,513	1,139	1,051	1,039	1,164	1,051	976	963	938	976	1,001	1,101	1,114
4	J A M B I	12,719	1,157	1,068	1,056	1,183	1,068	992	979	954	992	1,018	1,119	1,132
5	R I A U	6,875	626	578	571	639	578	536	529	516	536	550	605	612
6	BENGKULU	6,875	626	578	571	639	578	536	529	516	536	550	605	612
7	SUMATERA SELATAN	20,625	1,877	1,733	1,712	1,918	1,733	1,609	1,588	1,547	1,609	1,650	1,815	1,836
8	BANGKA BELITUNG	4,125	375	347	342	384	347	322	318	309	322	330	363	367
9	LAMPUNG	27,501	2,503	2,310	2,283	2,558	2,310	2,145	2,118	2,063	2,145	2,200	2,420	2,448
10	KEP. RIAU	344	31	29	29	32	29	27	26	26	27	28	30	31
11	DKI. JAKARTA	344	31	29	29	32	29	27	26	26	27	28	30	31
12	BANTEN	7,563	688	635	628	703	635	590	582	567	590	605	666	673
13	JAWA BARAT	68,751	6,256	5,775	5,706	6,394	5,775	5,363	5,294	5,156	5,363	5,500	6,050	6,119
14	D.I. YOGYAKARTA	12,375	1,126	1,040	1,027	1,151	1,040	965	953	928	965	990	1,089	1,101
15	JAWA TENGAH	137,503	12,513	11,550	11,413	12,788	11,550	10,725	10,588	10,313	10,725	11,000	12,100	12,238
16	JAWA TIMUR	257,817	23,461	21,657	21,399	23,977	21,657	20,110	19,852	19,336	20,110	20,625	22,688	22,946
17	B A L I	14,850	1,351	1,247	1,233	1,381	1,247	1,158	1,143	1,114	1,158	1,188	1,307	1,322
18	KALIMANTAN BARAT	15,813	1,439	1,328	1,312	1,471	1,328	1,233	1,218	1,186	1,233	1,265	1,392	1,407
19	KALIMANTAN TENGAH	1,513	138	127	126	141	127	118	116	113	118	121	133	135
20	KALIMANTAN SELATAN	894	81	75	74	83	75	70	69	67	70	72	79	80
21	KALIMANTAN TIMUR	3,094	282	260	257	288	260	241	238	232	241	248	272	275
22	SULAWESI UTARA	1,650	150	139	137	153	139	129	127	124	129	132	145	147
23	GORONTALO	1,100	100	92	91	102	92	86	85	83	86	88	97	98
24	SULAWESI TENGAH	2,406	219	202	200	224	202	188	185	180	188	193	212	214
25	SULAWESI TENGGARA	4,469	407	375	371	416	375	349	344	335	349	358	393	398
26	SULAWESI SELATAN	16,157	1,470	1,357	1,341	1,503	1,357	1,260	1,244	1,212	1,260	1,293	1,422	1,438
27	SULAWESI BARAT	1,375	125	116	114	128	116	107	106	103	107	110	121	122
28	NUSA TENGGARA BARAT	8,938	813	751	742	831	751	697	688	670	697	715	787	795
29	NUSA TENGGARA TIMUR	3,438	313	289	285	320	289	268	265	258	268	275	303	306
30	MALUKU	275	25	23	23	26	23	21	21	21	21	22	24	24
31	PAPUA	4,194	382	352	348	390	352	327	323	315	327	336	369	373
32	MALUKU UTARA	550	50	46	46	51	46	43	42	41	43	44	48	49
33	PAPUA BARAT	206	19	17	17	19	17	16	16	15	16	17	18	18
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>687,513</b>	<b>62,564</b>	<b>57,751</b>	<b>57,064</b>	<b>63,939</b>	<b>57,751</b>	<b>53,626</b>	<b>52,938</b>	<b>51,563</b>	<b>53,626</b>	<b>55,001</b>	<b>60,501</b>	<b>61,189</b>



Lampiran 3.27. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Hortikultura**

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	829	75	70	69	77	70	65	64	62	65	66	73	74
2	SUMATERA UTARA	1,890	172	159	157	176	159	147	146	142	147	151	166	168
3	SUMATERA BARAT	1,109	101	93	92	103	93	87	85	83	87	89	98	99
4	J A M B I	1,128	103	95	94	105	95	88	87	85	88	90	99	100
5	R I A U	610	55	51	51	57	51	48	47	46	48	49	54	54
6	BENGGULU	610	55	51	51	57	51	48	47	46	48	49	54	54
7	SUMATERA SELATAN	1,829	166	154	152	170	154	143	141	137	143	146	161	163
8	BANGKA BELITUNG	366	33	31	30	34	31	29	28	27	29	29	32	33
9	LAMPUNG	2,438	222	205	202	227	205	190	188	183	190	195	215	217
10	KEP. RIAU	30	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3
11	DKI. JAKARTA	30	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3
12	BANTEN	671	61	56	56	62	56	52	52	50	52	54	59	60
13	JAWA BARAT	6,096	555	512	506	567	512	475	469	457	475	488	536	543
14	D.I. YOGYAKARTA	1,097	100	92	91	102	92	86	84	82	86	88	97	98
15	JAWA TENGAH	12,192	1,109	1,024	1,012	1,134	1,024	951	939	914	951	975	1,073	1,085
16	JAWA TIMUR	22,860	2,080	1,920	1,897	2,126	1,920	1,783	1,760	1,714	1,783	1,829	2,012	2,034
17	B A L I	1,317	120	111	109	122	111	103	101	99	103	105	116	117
18	KALIMANTAN BARAT	1,402	128	118	116	130	118	109	108	105	109	112	123	125
19	KALIMANTAN TENGAH	134	12	11	11	12	11	10	10	10	10	11	12	12
20	KALIMANTAN SELATAN	79	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	7	7
21	KALIMANTAN TIMUR	274	25	23	23	26	23	21	21	21	21	22	24	24
22	SULAWESI UTARA	146	13	12	12	14	12	11	11	11	11	12	13	13
23	GORONTALO	98	9	8	8	9	8	8	8	7	8	8	9	9
24	SULAWESI TENGAH	213	19	18	18	20	18	17	16	16	17	17	19	19
25	SULAWESI TENGGARA	396	36	33	33	37	33	31	31	30	31	32	35	35
26	SULAWESI SELATAN	1,433	130	120	119	133	120	112	110	107	112	115	126	127
27	SULAWESI BARAT	122	11	10	10	11	10	10	9	9	10	10	11	11
28	NUSA TENGGARA BARAT	792	72	67	66	74	67	62	61	59	62	63	70	71
29	NUSA TENGGARA TIMUR	305	28	26	25	28	26	24	23	23	24	24	27	27
30	MALUKU	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
31	PAPUA	372	34	31	31	35	31	29	29	28	29	30	33	33
32	MALUKU UTARA	49	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
33	PAPUA BARAT	18	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>60,959</b>	<b>5,547</b>	<b>5,121</b>	<b>5,060</b>	<b>5,669</b>	<b>5,121</b>	<b>4,755</b>	<b>4,694</b>	<b>4,572</b>	<b>4,755</b>	<b>4,877</b>	<b>5,364</b>	<b>5,425</b>

Lampiran 3.28. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Perkebunan**

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	1,495	136	126	124	139	126	117	115	112	117	120	132	133
2	SUMATERA UTARA	3,408	310	286	283	317	286	266	262	256	266	273	300	303
3	SUMATERA BARAT	2,001	182	168	166	186	168	156	154	150	156	160	176	178
4	J A M B I	2,034	185	171	169	189	171	159	157	153	159	163	179	181
5	R I A U	1,099	100	92	91	102	92	86	85	82	86	88	97	98
6	BENGGULU	1,099	100	92	91	102	92	86	85	82	86	88	97	98
7	SUMATERA SELATAN	3,298	300	277	274	307	277	257	254	247	257	264	290	294
8	BANGKA BELITUNG	660	60	55	55	61	55	51	51	49	51	53	58	59
9	LAMPUNG	4,397	400	369	365	409	369	343	339	330	343	352	387	391
10	KEP. RIAU	55	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5
11	DKI. JAKARTA	55	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5
12	BANTEN	1,209	110	102	100	112	102	94	93	91	94	97	106	108
13	JAWA BARAT	10,993	1,000	923	912	1,022	923	857	846	825	857	879	967	978
14	D.I. YOGYAKARTA	1,979	180	166	164	184	166	154	152	148	154	158	174	176
15	JAWA TENGAH	21,987	2,001	1,847	1,825	2,045	1,847	1,715	1,693	1,649	1,715	1,759	1,935	1,957
16	JAWA TIMUR	41,225	3,752	3,463	3,422	3,834	3,463	3,216	3,174	3,092	3,216	3,298	3,628	3,669
17	B A L I	2,375	216	199	197	221	199	185	183	178	185	190	209	211
18	KALIMANTAN BARAT	2,528	230	212	210	235	212	197	195	190	197	202	223	225
19	KALIMANTAN TENGAH	242	22	20	20	22	20	19	19	18	19	19	21	22
20	KALIMANTAN SELATAN	143	13	12	12	13	12	11	11	11	11	11	13	13
21	KALIMANTAN TIMUR	495	45	42	41	46	42	39	38	37	39	40	44	44
22	SULAWESI UTARA	264	24	22	22	25	22	21	20	20	21	21	23	23
23	GORONTALO	176	16	15	15	16	15	14	14	13	14	14	15	16
24	SULAWESI TENGAH	385	35	32	32	36	32	30	30	29	30	31	34	34
25	SULAWESI TENGGARA	715	65	60	59	66	60	56	55	54	56	57	63	64
26	SULAWESI SELATAN	2,583	235	217	214	240	217	202	199	194	202	207	227	230
27	SULAWESI BARAT	220	20	18	18	20	18	17	17	16	17	18	19	20
28	NUSA TENGGARA BARAT	1,429	130	120	119	133	120	111	110	107	111	114	126	127
29	NUSA TENGGARA TIMUR	550	50	46	46	51	46	43	42	41	43	44	48	49
30	MALUKU	44	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4
31	PAPUA	671	61	56	56	62	56	52	52	50	52	54	59	60
32	MALUKU UTARA	88	8	7	7	8	7	7	7	7	7	7	8	8
33	PAPUA BARAT	33	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>109,934</b>	<b>10,004</b>	<b>9,234</b>	<b>9,125</b>	<b>10,224</b>	<b>9,234</b>	<b>8,575</b>	<b>8,465</b>	<b>8,245</b>	<b>8,575</b>	<b>8,795</b>	<b>9,674</b>	<b>9,784</b>

Lampiran 3.29. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Peternakan**

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	265	24	22	22	25	22	21	20	20	21	21	23	24
2	SUMATERA UTARA	605	55	51	50	56	51	47	47	45	47	48	53	54
3	SUMATERA BARAT	355	32	30	29	33	30	28	27	27	28	28	31	32
4	J A M B I	361	33	30	30	34	30	28	28	27	28	29	32	32
5	R I A U	195	18	16	16	18	16	15	15	15	15	16	17	17
6	BENGGKULU	195	18	16	16	18	16	15	15	15	15	16	17	17
7	SUMATERA SELATAN	585	53	49	49	54	49	46	45	44	46	47	51	52
8	BANGKA BELITUNG	117	11	10	10	11	10	9	9	9	9	9	10	10
9	LAMPUNG	780	71	66	65	73	66	61	60	59	61	62	69	69
10	KEP. RIAU	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	DKI. JAKARTA	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	BANTEN	215	20	18	18	20	18	17	17	16	17	17	19	19
13	JAWA BARAT	1,950	177	164	162	181	164	152	150	146	152	156	172	174
14	D.I. YOGYAKARTA	351	32	29	29	33	29	27	27	26	27	28	31	31
15	JAWA TENGAH	3,900	355	328	324	363	328	304	300	293	304	312	343	347
16	JAWA TIMUR	7,313	665	614	607	680	614	570	563	548	570	585	644	651
17	B A L I	421	38	35	35	39	35	33	32	32	33	34	37	37
18	KALIMANTAN BARAT	449	41	38	37	42	38	35	35	34	35	36	39	40
19	KALIMANTAN TENGAH	43	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4
20	KALIMANTAN SELATAN	25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
21	KALIMANTAN TIMUR	88	8	7	7	8	7	7	7	7	7	7	8	8
22	SULAWESI UTARA	47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	GORONTALO	31	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3
24	SULAWESI TENGAH	68	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	6	6
25	SULAWESI TENGGARA	127	12	11	11	12	11	10	10	10	10	10	11	11
26	SULAWESI SELATAN	458	42	38	38	43	38	36	35	34	36	37	40	41
27	SULAWESI BARAT	39	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
28	NUSA TENGGARA BARAT	254	23	21	21	24	21	20	20	19	20	20	22	23
29	NUSA TENGGARA TIMUR	98	9	8	8	9	8	8	8	7	8	8	9	9
30	MALUKU	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	PAPUA	119	11	10	10	11	10	9	9	9	9	10	10	11
32	MALUKU UTARA	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	PAPUA BARAT	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>19,500</b>	<b>1,775</b>	<b>1,638</b>	<b>1,619</b>	<b>1,814</b>	<b>1,638</b>	<b>1,521</b>	<b>1,502</b>	<b>1,463</b>	<b>1,521</b>	<b>1,560</b>	<b>1,716</b>	<b>1,736</b>

Lampiran 3.30. Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012  
 Tanggal : 30 Nopember 2012

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sub Sektor : Perikanan Budidaya**

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	300	27	25	25	28	25	23	23	23	23	24	26	27
2	SUMATERA UTARA	685	62	58	57	64	58	53	53	51	53	55	60	61
3	SUMATERA BARAT	402	37	34	33	37	34	31	31	30	31	32	35	36
4	J A M B I	409	37	34	34	38	34	32	31	31	32	33	36	36
5	R I A U	221	20	19	18	21	19	17	17	17	17	18	19	20
6	BENGGULU	221	20	19	18	21	19	17	17	17	17	18	19	20
7	SUMATERA SELATAN	663	60	56	55	62	56	52	51	50	52	53	58	59
8	BANGKA BELITUNG	133	12	11	11	12	11	10	10	10	10	11	12	12
9	LAMPUNG	884	80	74	73	82	74	69	68	66	69	71	78	79
10	KEP. RIAU	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	DKI. JAKARTA	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	BANTEN	243	22	20	20	23	20	19	19	18	19	19	21	22
13	JAWA BARAT	2,209	201	186	183	205	186	172	170	166	172	177	194	197
14	D.I. YOGYAKARTA	398	36	33	33	37	33	31	31	30	31	32	35	35
15	JAWA TENGAH	4,419	402	371	367	411	371	345	340	331	345	354	389	393
16	JAWA TIMUR	8,285	754	696	688	771	696	646	638	621	646	663	729	737
17	B A L I	477	43	40	40	44	40	37	37	36	37	38	42	42
18	KALIMANTAN BARAT	508	46	43	42	47	43	40	39	38	40	41	45	45
19	KALIMANTAN TENGAH	49	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
20	KALIMANTAN SELATAN	29	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3
21	KALIMANTAN TIMUR	99	9	8	8	9	8	8	8	7	8	8	9	9
22	SULAWESI UTARA	53	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5
23	GORONTALO	35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24	SULAWESI TENGAH	77	7	6	6	7	6	6	6	6	6	6	7	7
25	SULAWESI TENGGARA	144	13	12	12	13	12	11	11	11	11	11	13	13
26	SULAWESI SELATAN	519	47	44	43	48	44	40	40	39	40	42	46	46
27	SULAWESI BARAT	44	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4
28	NUSA TENGGARA BARAT	287	26	24	24	27	24	22	22	22	22	23	25	26
29	NUSA TENGGARA TIMUR	110	10	9	9	10	9	9	9	8	9	9	10	10
30	MALUKU	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	PAPUA	135	12	11	11	13	11	11	10	10	11	11	12	12
32	MALUKU UTARA	18	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2
33	PAPUA BARAT	7	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
<b>JUMLAH PROPINSI</b>		<b>22,094</b>	<b>2,011</b>	<b>1,856</b>	<b>1,834</b>	<b>2,055</b>	<b>1,856</b>	<b>1,723</b>	<b>1,701</b>	<b>1,657</b>	<b>1,723</b>	<b>1,768</b>	<b>1,944</b>	<b>1,966</b>